Angga Aulia Akbar
MENGUAK
HUBUNGAN
DAGANG
INDONESIA
-ISRAEL
MARJIN KIRI

MENGUAK HUBUNGAN DAGANG INDONESIA-ISRAEL

ANGGA AULIA AKBAR (lahir di Jakarta, 1984) memperoleh gelar Magister Sains (M.Si) Ilmu Politik di Universitas Nasional, Jakarta. Kini sedang melanjutkan studi doktoral di FISIP Universitas Indonesia. Buku ini diolah dari tesis masternya.

Menguak Hubungan Dagang Indonesia-Israel

ANGGA AULIA AKBAR

Prakata

BUKU TIPIS INI MERUPAKAN OLAHAN DARI TESIS YANG SAYA selesaikan untuk program pascasarjana (S2) Ilmu Politik Universitas Nasional. Di dalamnya, tidak banyak perubahan dilakukan, sehingga substansi tesis maupun substansi buku tetaplah sama. Metodologi dan kerangka teorinya pun tidak dimodifikasi, sekalipun mungkin berubah penempatannya dalam pembabakan bab dan tata kalimat. Oleh karena itu, kelemahan-kelemahan yang mungkin ada dalam bahasan teoretis dalam tesis bisa jadi tetap akan terlihat dalam format buku ini. Kendati demikian, terlepas dari kekurangan tersebut, saya berharap semoga data, informasi, dan pengetahuan yang dihadirkan oleh buku ini tetap dapat bermanfaat.

Pada prakata ini juga, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT, karena atas kehendak-Nya, penelitian yang saya lakukan ini dapat selesai dan dapat diterbitkan.

Terima kasih untuk semua teman seangkatan Pascasarjana Ilmu Politik UNAS yang selalu memberikan motivasi kepada saya agar terus tetap melakukan penelitian ini hingga tuntas. Terima kasih yang mendalam saya ucapkan kepada para pengajar, terlebih-lebih Prof. Dr. Boermauna selaku pembimbing

yang selalu sabar menunggu perkembangan penulisan tesis hingga selesai.

Rasa terima kasih yang sebesar-besarnya juga tidak lupa saya berikan kepada Emanuel Shahaf, R. Sulistya Widayanta dari Kementerian Perdagangan, dan Nanda Avalis dari Kementerian Luar Negeri selaku narasumber yang dengan terbuka memberikan data serta informasi sehingga penelitian yang hampir terhenti ini dapat terselesaikan. Serta terima kasih juga atas izinnya untuk mempublikasikan apa yang mereka sampaikan.

Terima kasih juga saya ucapkan kepada Ferry Jacob dari Kementerian Perdagangan atas kesediaannya memberikan berbagai data yang dibutuhkan serta izinnya untuk dipublikasikan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ganewati Wuryandari, Ph.D dan Hamdan Basyar, M.Si dari LIPI, juga Prof. A.A Banyu Perwita, Ph.D atas kesediaannya menyempatkan waktu untuk berdialog pada awal saya melakukan penelitian.

Terima kasih juga saya ucapkan kepada seluruh pihak yang terus mendorong agar penelitian ini dipublikasikan, yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu.

Tak tertinggal, rasa terima kasih yang mendalam untuk seluruh pihak dari Marjin Kiri atas kesediaan dan kerja kerasnya menerbitkan penelitian saya.

Terima kasih yang tak terbendung, saya ucapkan kepada ayahanda Moh.Taufik Hidayat dan ibunda Siti Fauziah atas doa dan dukungannya dalam segala hal. Juga Anesa H. Siregar dan Atiek Ratnani serta keluarga besar yang lama menunggu terbitnya buku ini.

Terakhir, terima kasih kepada istri tercinta, Anstika Chintya serta kedua buah hati Azfarizz Akbar Al-Khashah dan Aulia Ahdzea Azzamecca atas doa, semangat dan motivasi yang diberikan.

Januari 2013

ANGGA AULIA AKBAR

Daftar Isi

1 / Pendahuluan

KONFLIK TIMUR TENGAH ANTARA PALESTINA-ISRAEL MASIH terus menjadi wacana panas dalam politik internasional. Hal ini tidak terlepas dari sulitnya menemukan kesepakatan yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Medan yang dipertikaikan dalam konflik ini sesungguhnya tak besar, kurang lebih seperlima luas Pulau Jawa, namun sejarah panjang yang melatarinya serta besarnya kepentingan-kepentingan yang bermain membuat konflik ini menjadi masalah serius dalam politik internasional.

Peningkatan status Palestina menjadi "negara pengamat bukan anggota" di PBB pada akhir November 2012, saat buku ini disusun, membuka babak baru dalam perkembangan konflik ini. Sungguh suatu kemajuan yang signifikan, meski reaksi pemerintah Amerika Serikat yang mengancam akan menahan dana untuk otorita Palestina, maupun reaksi Israel yang langsung meloloskan rencana pembangunan 3.000 rumah bagi pemukim Yahudi di Tepi Barat dan Yerusalem timur menunjukkan bahwa jalan menuju perdamaian masih akan sangat panjang dan berliku.

Secara historis, konflik Palestina-Israel dipicu oleh suatu keyakinan religius kaum Yahudi yang lambat laun berubah

ideologi politik Zionisme pada abad ke-19, yakni bahwa diaspora Yahudi yang menderita di seluruh dunia harus kembali ke tanah yang telah dijanjikan bagi mereka.[1] Masalahnya, wilayah yang dianggap sebagai tanah terjanji itu telah sejak lama pula didiami oleh bangsa Palestina, dan kedatangan orang Yahudi (serta pendirian negara Israel sesudahnya) tentu telah memperkecil wilayah Palestina secara perlahan. Aliyah[2] pertama (1882-1903) berlangsung dengan datangnya 25 ribu orang Yahudi ke Palestina. Aliyah kedua (1904-1914) membawa kedatangan 30 ribu orang.[3]

Selanjutnya, angka imigran Yahudi ke Palestina semakin meroket setelah lahirnya deklarasi Balfour 1917 antara Inggris dan Perancis pasca runtuhnya kekuasaan Bani Utsmani Turki yang sebelumnya menguasai penuh tanah Palestina.[4] Angka 56.000 jiwa kaum Yahudi yang telah menetap di Palestina saat dikeluarkannya deklarasi tersebut bertambah beberapa kali lipat hingga mencapai 445.457 jiwa pada 1939 dan selanjutnya menjadi 650.000 jiwa atau setara dengan 31 persen dari total penduduk Palestina pada 1948.[5]

Pendudukan Israel atas Palestina terus berlanjut seiring

1. Gregory Harms dan Todd M. Ferry, *The Palestine–Israel Conflict: A Basic Introduction. Second Edition* (London dan Ann Arbor: Pluto Press, 2008), hlm. 47-64.
2. Aliyah (dari bahasa Ibrani "naik" atau "pindah ke atas") adalah istilah yang umum dipakai untuk menyebut gelombang migrasi Yahudi ke Israel.
3. Harms dan Ferry, *op. cit.*, hlm. 61-62.
4. Deklarasi Balfour yang kontroversial memuat pernyataan Menteri Luar Negeri Inggris Arthur Balfour bahwa *"His Majesty's Government view with favour the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people."* Frase *"national home"* sangatlah multitafsir dan menjadi pangkal sengketa status Palestina-Israel. Bagi kubu Zionis, ini diartikan sebagai pendirian negara tersendiri. Bagi kubu anti Zionis, termasuk Presiden AS Woodrow Wilson, ini diartikan sebagai semacam protektorat Yahudi di negara Palestina. Lihat Harms dan Ferry, *op. cit.*, hlm. 70.
5. Herry Nurdi, *Membongkar Rencana Israel Raya* (Jakarta: Cakrawala, 2009), hlm. 142.

dengan perluasan teritorial Israel pasca berdirinya negara tersebut pada 1948 berdasarkan resolusi PBB 181 tahun 1947.[6] Hal ini secara otomatis terus menggerus hak Palestina atas wilayahnya. Israel terus menambah pemukiman baru di Yerusalem Timur, yang membuat perdamaian Israel-Palestina semakin sulit dipertemukan.

Negara-negara dunia termasuk Indonesia secara umum terus mendukung proses perdamaian Israel-Palestina. Secara khusus, Indonesia juga termasuk sedikit negara dunia yang mendukung kemerdekaan Palestina agar dapat berdiri sejajar dengan Israel berdasarkan resolusi dua negara, mengingat hal ini sejalan dengan kapasitas nasional serta prinsip-prinsip kebijakan luar negeri Indonesia yang secara tegas diungkapkan oleh Marty Natalegawa melalui kapasitasnya sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia Kabinet Indonesia Bersatu jilid II.[7]

Dukungan penuh Indonesia menyangkut proses perdamaian tersebut dapat terlihat dari peran Indonesia dalam kancah politik internasional baik secara regional maupun global. Salah satu peran dalam konteks regional, Indonesia bersama-sama dengan negara Asia lainnya melalui Asian Parliamentary Assembly menyerukan agar Palestina menjadi negara merdeka seperti yang tertera pada poin ke-7 dari 15 resolusi yang dihasilkan dalam sidang yang berlangsung pada Desember 2009 di Gedung Merdeka, Bandung.[8]

6. Resolusi PBB 181 tahun 1947 merupakan pembagian wilayah Palestina dengan mengalokasikan 56,5% untuk didirikannya negara Yahudi dan 43% untuk didirikannya negara Arab serta menjadikan Yerusalem sebagai teritori internasional. Resolusi ini disusun berdasarkan saran Komite Khusus PBB untuk Palestina (UNSCOP). Lihat Muhsin Labib dan Irman Abdurrahman, *Gelegar Gaza* (Jakarta: Zahra, 2009), hlm. 163.
7. Pernyataan pers tahunan di kantor Departemen Luar Negeri, 8 Januari 2010.
8. Poin ke-7 dalam dokumen Asian Parliamentary Assembly (APA) 2009, "Bandung Declaration: On The Roles of Asian Parliaments in Strengthening Democracy towards Prosperity, Peace and Justice in Asia," memuat dukungan terhadap kemerdekaan Palestina dengan Al-Quds sebagai ibukotanya.

Sedangkan secara global, sejak awal keanggotaannya sebagai salah satu dari anggota tidak tetap[9] Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK-PBB), Indonesia selalu mendorong agar DK-PBB mengeluarkan putusan terkait masalah Palestina, termasuk dalam bentuk *presidential statement* maupun resolusi, sebagai cerminan tanggung jawab DK-PBB dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Termasuk atas dorongan Indonesia jugalah, pada 16 Desember 2008, untuk pertama kalinya sejak 2004, DK-PBB mengesahkan resolusi No. 1850 mengenai proses perdamaian di Timur Tengah, khususnya Israel-Palestina, yang rancangannya disiapkan oleh delegasi AS dan Rusia.[10]

Berkaitan dengan itu, peranan Indonesia secara keseluruhan tidak terlepas dari kapasitas Indonesia sebagai negara yang tidak bisa dipandang sebelah mata dalam dunia internasional, mengingat Indonesia memiliki jumlah penduduk besar sehingga mendapatkan enam kursi dalam Asian Parliamentary Assembly, sumber daya alam berlimpah yang penting bagi perekonomian dan pemenuhan kebutuhan, serta berpenduduk Muslim terbesar di dunia.

Kondisi tersebut secara tidak langsung telah menempatkan Indonesia dalam sorotan mata dunia internasional yang secara bersamaan sejalan dengan landasan serta prinsip kebijakan luar negeri Indonesia sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 dalam rangka membantu proses perdamaian Palestina-Israel yang merupakan konflik utama dengan korban yang luar biasa besar.

Sejalan dengan mendiplomasikan hak-hak rakyat serta kemerdekaan negara Palestina dalam kancah politik internasional

9. Indonesia telah menjadi anggota tidak tetap dalam Dewan Keamanan PBB sebanyak tiga kali, yaitu pada periode 1973-1974, periode 1995-1996, dan periode 2006-2008.
10. Lihat penjelasan Kementerian Luar Negeri RI mengenai posisi Indonesia dalam isu Palestina: http://www.deplu.go.id/Pages/IIssueDisplay.aspx?IDP=15&l=id, 28 Desember 2009, 00:02 WIB.

tersebut, Indonesia turut membantu Palestina secara langsung baik dengan materi maupun non-materi dalam rangka menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia (HAM) serta sebagai bentuk rasa peduli terhadap hubungan kedua negara.

Salah satu bantuan materi yang diberikan oleh pemerintah Indonesia secara langsung disampaikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kepada Mahmoud Abbas saat pemimpin Palestina tersebut mengadakan kunjungan bilateral di Jakarta pada 29 Mei 2010 lalu. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia memberikan dana kemanusiaan sebesar Rp20 miliar untuk biaya pembangunan rumah sakit di jalur Gaza.[11]

Selain bantuan dari pemerintah pusat, berbagai organisasi kemasyarakatan di antaranya Medical Emergency Rescue-Committe (Mer-C), Komite Indonesia Solidaritas Palestina (KISPA), serta Sahabat Al-Aqsha Hidayatullah turut memberikan bantuan kemanusiaan untuk Palestina sebesar Rp13 miliar.[12] Namun sebagian dana bantuan yang dikirim langsung ke Palestina dengan menggunakan alat transportasi laut milik Turki Mavi Marmara itu kandas akibat penyerangan misi kemanusiaan tersebut pada 30 Mei 2010.

Sebagai salah satu bentuk bantuan non-materi, pemerintah Indonesia juga memberikan beasiswa bagi warga Palestina yang ingin melanjutkan pendidikannya di Indonesia. Selain itu, pemerintah Indonesia juga mengadakan program *Capacity Building for Palestinians* yang merupakan sebuah pendidikan dan pelatihan untuk 1000 warga Palestina. Program pelatihan yang sudah berjalan sejak 2008 ini direncanakan akan terus berlanjut hingga 2013.[13]

Namun, berbagai upaya Indonesia untuk membantu proses perdamaian Timur Tengah serta mendukung kemerdekaan

11. *Jakarta Post,* Minggu, 30 Mei 2010, hlm. 1.
12. *Kompas,* Selasa, 1 Juni 2010, hlm. 7.
13. *Kompas,* Senin, 19 April 2010, hlm. 34.

Palestina tersebut belum secara signifikan menggeser keadaan menjadi lebih baik. Hal ini dikarenakan adanya berbagai hambatan seperti sulitnya menekan Israel, adanya konflik internal Palestina, serta masalah ekonomi-politik domestik Indonesia yang kerap menimbulkan polemik sehingga penyelenggara negara cenderung menyusun kebijakan yang melemahkan konsistensinya dalam menyikapi masalah Palestina-Israel.

Sulitnya menekan Israel dikarenakan adanya beberapa faktor, yaitu: faktor psikologis, faktor komposisi koalisi pemerintahan Israel, serta faktor ideologi mengenai keamanan.[14] Dilihat secara psikologis, Israel merasa sebagai negara di atas hukum. *Mindset* tersebut tercermin dalam aksi-aksi Israel yang cenderung mengabaikan kesepakatan internasional demi kepentingannya sendiri. Faktor psikologis ini lahir dari eratnya hubungan Israel dengan AS yang ditandai dengan berbagai macam bentuk perlindungan dari negara adikuasa tersebut.

Di samping itu, komposisi koalisi pemerintahan PM Benjamin Netanyahu yang notabene ultra kanan dari kubu agama dan nasionalis radikal atau berintikan kubu garis keras menjadikan Israel semakin sulit ditekan.[15] Artinya, dengan komposisi pemerintahan tersebut, proses perdamaian akan cenderung terabaikan serta berpotensi menimbulkan kekerasan, mengingat kubu tersebut lebih memprioritaskan kelanjutan pembangunan pemukiman Yahudi.[16]

Sedangkan faktor ideologi keamanan yang telah diterapkan Israel sejak 1948 terdiri dari dua pendekatan, yaitu pendekatan keamanan terhadap Palestina dan pendekatan keamanan terhadap musuh-musuh lebih luas di Timur Tengah seperti Iran, Suriah, Lebanon dll.[17] Kedua pendekatan ini kerap digunakan

14. *Kompas,* Kamis, 10 Juni 2010, hlm. 9.
15. *Ibid.*
16. *Jakarta Post,* Rabu, 6 Oktober 2010, hlm. 8.
17. *Kompas,* Kamis, 10 Juni 2010.

sebagai dalih untuk melaksanakan kepentingan Israel serta menekan posisi lawan-lawannya dalam politik internasional.

Di sisi lain, hambatan bagi proses perdamaian juga datang dari dalam tubuh Palestina sendiri dengan adanya dualisme kekuatan antara Hamas dan Fatah. Dalam menjalankan pemerintahan, dua kubu tersebut memiliki perbedaan prinsip yang sangat mendasar. Fatah, yang secara mayoritas menguasai Tepi Barat dan telah berubah menjadi "faksi pemerintah" dalam Otoritas Palestina sejak Mei 1994, bersifat nasionalis dan cenderung berjuang untuk memperoleh kemerdekaan melalui meja perundingan serta mengakui eksistensi Israel dalam kedamaian dan keamanan. Sedangkan Hamas, yang secara mayoritas menguasai jalur Gaza dan lahir dari pergerakan Islam pada 1988, menuntut berdirinya negara Palestina sebagai negara Islam melalui perjuangan fisik serta menolak secara tegas eksistensi Israel.[18]

Perselisihan antara Hamas dan Fatah mulai muncul ke permukaan sejak Fatah yang merupakan faksi terbesar dalam Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) secara resmi menyatakan pengakuannya terhadap Israel melalui *Declaration of Principles* pada 13 September 1993,[19] dan semakin memanas ketika puncak kekuasaan yang didapat Hamas dalam pemilu 2006 diambil alih oleh Fatah. Hingga saat ini, hubungan yang tidak selaras antara Hamas dan Fatah masih tetap mewarnai politik internal Palestina dan secara otomatis turut menghambat terciptanya perdamaian di kawasan Timur Tengah. Pemungutan suara historis di PBB pada akhir November 2012 yang memberi Palestina status "negara pengamat bukan anggota", misalnya, juga tak terlepas dari persaingan Hamas-Fatah ini. Persetujuan yang diberikan oleh 138 negara dunia semacam

18. Ibnu Burdah, *Konflik Timur Tengah: Aktor, Isu, dan Dimensi Konflik* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008), hlm. 51-54.
19. *Ibid.*, hlm. 52.

menjadi pernyataan dukungan bagi pemerintahan Fatah yang memilih jalan diplomasi damai, setelah dalam krisis Gaza hanya 10 hari sebelumnya Hamas sempat "naik daun" di mata warga Palestina karena serangan roket Hamas berhasil membuat Israel kewalahan.

Sedangkan hambatan yang berasal dari keadaan domestik Indonesia tidak terlepas dari benturan antara kepentingan politik dan kepentingan ekonomi. Secara politik, pandangan Indonesia terhadap Israel tidak mengalami perubahan. Sejak Israel memproklamasikan kemerdekaannya pada 14 Mei 1948 pasca resolusi PBB 1947 hingga saat ini, Indonesia tetap menganggap Israellah aktor utama penyebab konflik regional Timur Tengah yang berkepanjangan.

Apalagi, kemerdekaan Palestina dengan resolusi dua negara belum juga terwujud hingga saat ini. Keadaan ini membuat Indonesia berkepentingan untuk tidak mengadakan kontak apapun dengan Israel dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional serta menjalankan amanat yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 guna menciptakan perdamaian dan menghapus segala bentuk penjajahan.

Keberadaan isu HAM pada halaman depan agenda politik luar negeri Indonesia tersebut secara otomatis telah memperkecil peluang Israel untuk menjalin kerjasama formal dengan Indonesia guna memenuhi ambisi serta obsesi yang telah lama tertuang dalam kepentingan politik luar negeri yang telah dirumuskan Knesset, dewan legislatif Israel. Secara garis besar, kepentingan Israel untuk merangkul Indonesia tidak terlepas pada kenyataan bahwa Indonesia merupakan akses penting untuk menarik perhatian negara berkembang yang belum memiliki hubungan ekonomi maupun politik dengan Israel, serta dapat dijadikan sebagai pintu gerbang untuk masuk ke dunia Islam dalam rangka memulihkan hubungan dengan dunia Islam, mengingat Indonesia merupakan negara dengan jumlah pen-

duduk Muslim terbesar di dunia.[20]

Namun di balik ketidakselarasan hubungan politik tersebut, antara Indonesia dan Israel terjalin hubungan ekonomi yang secara dinamis mengalami pergeseran seiring dengan perubahan kondisi domestik maupun global. Secara singkat, pada masa pemerintahan Orde Lama, hubungan Indonesia-Israel diwarnai oleh kentalnya semangat ideologis. Melalui konsep *new emerging forces (nefos)* dan *old established forces (oldefos)*, Soekarno mengalihkan pandangannya dari Barat dan lebih memusatkan kerjasama pada negara-negara *nefos*. Kondisi ini secara tegas tergambar ketika Indonesia menolak partisipasi Israel dalam Asian Games 1962 yang diadakan di Jakarta, karena Israel dipandang sebagai bagian dari *oldefos*.[21]

Berbeda dari era Soekarno yang tidak memiliki kerjasama ekonomi dengan Israel, pemerintah Orde Baru sedikit memberikan peluang bagi Israel untuk berperan dalam perekonomian Indonesia, khususnya dalam perdagangan.[22] Di samping itu, Israel turut berkontribusi besar bagi modernisasi Angkatan Udara (AU) Indonesia dalam rangka meningkatkan ketahanan nasional dengan memenuhi pengadaan pesawat A-4 Skyhawk termasuk pelatihan skuadron pada 1980.[23] Situasi seperti ini secara eksplisit menggambarkan bahwa kerjasama Indonesia dengan Israel periode Soeharto tidak hanya terkait dalam perdagangan tetapi juga mencakup ilmu pengetahuan dan teknologi.

Selanjutnya, pada periode pasca-Orde Baru, hubungan

20. Riza Sihbudi, "Perkembangan Timur Tengah dan Masalah Hubungan Indonesia-Israel," dalam Zainuddin Djafar, *Perkembangan Studi Hubungan Internasional dan Tantangan Masa Depan* (Jakarta: Dunia Pustaka, 1996), hlm. 130.
21. Michael Leifer, *Politik Luar Negeri Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 1986), hlm. 103.
22. Lihat neraca perdagangan Indonesia-Timur Tengah 1986-1991 dalam Tabel 2.1, hlm 58-59 buku ini.
23. Djoko Poerwoko, *Menari di Angkasa* (Jakarta: Kata Hasta Pustaka, 2006), hlm. 81-109.

ekonomi yang mencakup perdagangan antara Indonesia-Israel semakin meningkat dari periode sebelumnya. Berdasarkan catatan Badan Pengambangan Ekspor Nasional (BPEN), nilai ekspor Indonesia ke Israel antara 1999-2003 sebesar AS$ 32.670.000 sedangkan nilai ekspor Indonesia ke seluruh dunia untuk produk yang sama sebesar AS$ 44.817.784.000. Sementara nilai ekspor Israel ke Indonesia antara 1999-2003 sebesar AS$ 9.972.000 sedangkan nilai ekspor Israel secara global pada produk yang sama sebesar AS$ 15.234.281.000.[24]

Dari data tersebut, skor tertinggi nilai ekspor Indonesia ke Israel adalah air mineral, minyak, dan produk penyulingan yakni sebesar AS$ 17.069.000. Sedangkan Indonesia mengekspor ke berbagai negara lainnya untuk komoditi yang sama sebesar AS$ 15.712.977.000. Sementara itu, skor tertinggi nilai ekspor Israel ke Indonesia adalah penyamakan, bahan celup dan zat pewarna yakni sebesar AS$ 3.291.000, sedangkan ekspor Israel ke berbagai negara lainnya untuk komoditi yang sama sebesar AS$ 96.044.000. Nilai tersebut secara keseluruhan terus meningkat pada tahun berikutnya hingga saat ini.[25]

Data yang diperoleh dari pemberitahuan ekspor atau impor barang (PEB atau PIB) berdasarkan surat keterangan asal (SKA) atau *Certificate of Origin* (CoO) masing-masing negara tersebut, secara implisit menunjukan bahwa baik pemerintah maupun swasta dari kedua belah pihak secara intensif telah melakukan kontak dagang dengan jalan tukar menukar produk.

Kerangka kerja seperti ini dianggap tidak sesuai dengan komitmen Indonesia dalam perdagangan internasional yang tidak memperkenankan perdagangan di luar hubungan diplo-

24. Imam Marsudi, *Pandangan Partai-Partai Politik Indonesia Terhadap Prospek Formalisme Hubungan Dagang Indonesia-Israel,* tesis Studi Kajian Timur Tengah dan Islam, Pascasarjana Universitas Indonesia, 2005, hlm. 104-105.
25. Lihat nilai ekspor dan impor Indonesia-Israel dalam Tabel 2.2 dan 2.3.

matik demi tercapainya tujuan politik luar negeri,[26] serta melangkahi Pasal 5 Bab II dalam UU no 37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri[27] yang menyiratkan bahwa hubungan luar negeri dalam bentuk apapun harus sesuai dengan kebijakan politik luar negeri walaupun dimaksudkan untuk pemulihan ekonomi domestik.

Dalam arti lain, dengan mengamati dan merespons kondisi Timur Tengah, khususnya Palestina-Israel, yang merupakan salah satu bagian dari input dalam perumusan kebijakan politik luar negeri, tentunya perdagangan Indonesia-Israel walaupun tidak secara formal dan dilakukan melalui Singapura atau pihak ketiga, merupakan sebuah variabel yang tidak sejalan. Kondisi seperti ini tentunya telah menunjukan adanya benturan antara kepentingan ekonomi dan politik: di satu sisi Indonesia mengutuk Israel, namun di sisi lain Indonesia melakukan kegiatan perdagangan dengan Israel.

Terlebih lagi kontak perdagangan tersebut dilegalkan melalui Keputusan Menteri (Kepmen) No.23/MPP/01/2001 tertanggal 10 Januari 2001.[28] Ini membuat pemerintah seakan-akan tidak memiliki prioritas utama dalam menyikapi kasus Palestina-Israel. Sehingga, tingkat konsistensi yang rendah terhadap pelaksanaan kepentingan nasional ini merupakan bagian

26. Amir MS, *Seluk Beluk dan Teknik Perdagangan Luar Negeri* (Jakarta: PPM, 2004), hlm. 98.
27. Pasal 5 bab II mengenai penyelenggaraan hubungan dalam negeri dan pelaksanaan politik luar negeri dalam UU no 37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri menyebutkan bahwa: 1. hubungan luar negeri diselenggarakan sesuai dengan politik luar negeri, peraturan perundang-undangan nasional dan hukum serta kebiasaan internasional. 2. ketentuan dalam ayat 1 berlaku bagi semua penyelenggara hubungan luar negeri, baik pemerintah maupun non pemerintah. (Kalangan non-pemerintah yang dimaksud dalam ayat 2 mencakup perseorangan dan organisasi yang oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa lazim disebut dan dikategorikan sebagai *non governmental organization* (NGO), termasuk Dewan Perwakilan Rakyat).
28. Rizky Ridyasmara, *Fakta & Data Yahudi di Indonesia: Era Reformasi* (Jakarta: Al-Kautsar, 2009), hlm. 205.

dari hambatan yang dihadapi Indonesia dalam mendukung proses perdamaian Palestina-Israel secara umum dan mendukung berdirinya Palestina berdasarkan resolusi dua negara secara khusus.

Di samping itu, sejak mencuatnya wacana mengenai formalisme hubungan dagang Indonesia-Israel di masa pemerintahan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) hingga berlakunya Kepmen No.23/MPP/01/2001 sampai saat ini, politik luar negeri bebas aktif kerap dijadikan referensi yang sangat mendasar dalam menyikapi perdagangan dengan Tel Aviv. Di satu sisi, para pelaku ekonomi berpendapat bahwa Indonesia sebagai negara yang memiliki *non-allignment policy* seharusnya tidak memihak negara manapun terkait konflik Timur Tengah, sehingga wajar untuk menjalin kerjasama dengan negara manapun tanpa membedakan status.[29] Pendapat ini secara implisit menilai kontak dagang dengan Israel sesuai dengan politik luar negeri bebas aktif.

Ditambah lagi, Alwi Shihab yang pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid menjabat sebagai Menteri Luar Negeri menilai bahwa selain untuk berpartisipasi di era globalisasi serta memenuhi sasaran ekonomi, formalisasi kontak dagang tersebut dapat dijadikan sebuah langkah dalam mengupayakan perdamaian serta mendiplomasikan hak Palestina[30] dan juga memperbaiki citra buruk Indonesia yang selama ini dicap sebagai negara anti-Yahudi di mata Kongres AS.[31]

Berkebalikan dari itu, pihak satunya menolak gagasan bahwa dengan adanya suatu hubungan formal dengan Israel, perdamaian Palestina-Israel dapat terealisasikan. Dengan kata

29. Lihat misalnya petisi yang diklaim dibuat atas nama "segenap bangsa Indonesia" dalam menyikapi formalisasi hubungan diplomatik Indonesia-Israel ini: http://www.petitiononline.com/IsraelRi/petition.html, 16 Desember 2009, 23:08 WIB.
30. Imam Marsudi, *op. cit.*, hlm. 78.
31. Ishak Rafick, *Catatan Hitam Lima Presiden Indonesia: Jalan Baru Membangun Indonesia* (Jakarta: Ufuk Press, 2007), hlm. 336.

lain, hubungan apapun termasuk hubungan dagang dengan Israel tidak akan menjamin perdamaian Palestina-Israel dapat terealisasikan.[32] Oleh karena itu, politik luar negeri bebas aktif merupakan salah satu alasan mengapa kontak dagang dengan Israel tidak perlu dilakukan, karena bertentangan dengan semangat perdamaian dunia dan hak asasi manusia.[33]

Perbedaan pendapat yang kompleks tersebut menyiratkan bahwa terdapat tumpang tindih pemahaman mengenai definisi serta makna dari kata "bebas aktif" dalam menyikapi hubungan perdagangan antar bangsa. Hal ini tentunya menarik untuk dikaji lebih dalam untuk menilai hubungan dagang Indonesia-Israel dalam implementasi politik luar negeri bebas aktif Indonesia, mengingat "bebas aktif" masih dijadikan pegangan politik luar negeri Indonesia sampai saat ini serta telah legalnya perdagangan Indonesia-Israel sejak 2001 berdasarkan Keputusan Menteri No.23/MPP/01/2001.

Buku ini membatasi jangka waktu penelitiannya mulai dari 2001 hingga 2010. Dengan kata lain, batasan waktu penelitian ini diawali sejak berlakunya Kepmen No. 23/MPP/01/2001 mengenai legalitas perdagangan antara para pelaku usaha nasional dengan Israel, yang dikeluarkan pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid hingga 2010 pada awal masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam Kabinet Indonesia Bersatu jilid kedua.

Selain merujuk pada batasan waktu sesuai berlakunya Kepmen No. 23/MPP/01/2001, penelitian ini juga hanya menitikberatkan pada sektor ekspor-impor kedua negara yang berdasarkan data statistik perdagangan semakin meningkat seiring dengan berjalannya waktu.

Meninjau adanya tumpang tindih pemahaman mengenai

32. Pendapat Sumargono, fungsionaris Partai Bulan Bintang, dalam Imam Marsudi, *op. cit.*, hlm. 88-90.
33. Pendapat Burhan Magenda, fungsionaris Golkar, *ibid.*, hlm. 64.

definisi serta makna "politik luar negeri bebas aktif" dalam menyikapi perdagangan Indonesia-Israel, maka pertanyaan yang muncul dan dijadikan pokok bahasan buku ini adalah: Apakah perdagangan antara Indonesia-Israel sesuai dengan implementasi politik bebas aktif yang memperjuangkan tujuan dan kepentingan nasional? Dan mengapa pemerintah Indonesia melalui Departemen Perdagangan melegalkan perdagangan Indonesia-Israel melalui Kepmen No 23/MPP/01/2001 dan tetap memberlakukannya hingga saat ini?

DASAR TEORI POLITIK LUAR NEGERI

Secara garis besar, kerangka teoretis buku ini menggunakan konsep dan teori politik luar negeri, hubungan luar negeri, dan kepentingan nasional sebagai pisau analisa untuk menjawab pokok permasalahan yang diajukannya.

Politik luar negeri suatu negara merupakan refleksi dari kepentingan nasionalnya sehingga perubahan-perubahan yang terjadi di dalam negeri turut mewarnai politik luar negeri tersebut. Tujuan politik luar negeri suatu negara dipengaruhi oleh sasaran yang dilihat dari masa lalu dan aspirasi untuk masa yang akan datang. Tujuan nasional yang hendak dijangkau melalui kebijakan luar negeri merupakan formulasi konkret dan dirancang dengan mengaitkan kepentingan nasional terhadap situasi internasional yang sedang berlangsung serta kekuatan yang dimiliki untuk menjangkaunya.[34] Menurut Hans Mor-

34. Jack C. Plano dan Roy Olton, *Kamus Hubungan Internasional* (Bandung: Abardin, 1999), hlm. 6. Lihat juga Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 51. Ulasan teoretis ini juga banyak mengutip Yanyan Mochamad Yani, "Politik Luar Negeri," makalah pada Ceramah Sistem Politik Luar Negeri bagi Perwira Siswa Sekolah Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (Sesko TNI AU) Angkatan ke-44 TP 2007, Bandung, 16 Mei 2007.

genthau, yang tersirat dan inheren dalam konsep kepentingan nasional adalah kelangsungan hidup. Morgenthau juga menyatakan bahwa syarat minimum suatu negara adalah kemampuan untuk melindungi identitas fisik, politik, dan budayanya dari gangguan negara lain.[35]

Selain dari kondisi dalam negeri dan kepentingan nasional, politik luar negeri suatu negara juga ditentukan oleh empat domain, yaitu lingkungan konteks internasional, perilaku para pengambil kebijakan politik luar negeri, dampak kondisi ekonomi terhadap suatu negara, dan peran politik dalam perumusan politik luar negeri.[36]

Pelaksanaan perdagangan antar negara pada waktu tertentu bisa terhalang (dan menghalangi) pencapaian suatu kepentingan yang lebih utama ketimbang kepentingan ekonomi. Akibatnya, demi mencapai tujuan politik luar negeri suatu negara tersebut, perdagangan tidak diperkenankan dengan negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik.[37]

Kebijakan pembatasan politis dalam perdagangan antar negara yang merupakan salah satu unit dari hubungan ekonomi internasional tersebut secara langsung memperlihatkan adanya dua variabel, yaitu politik dan ekonomi yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi. Menurut J.E. Spero, pengaruh faktor politik di dalam perekonomian tidak terlepas dari kenyataan bahwa: (1) sistem politik membentuk sistem ekonomi, hal ini dikarenakan struktur dan kerangka kerja sistem ekonomi internasional ditentukan oleh struktur dan kerangka kerja sistem politik internasional; (2) masalah politik cenderung membentuk kebijakan ekonomi sehingga kebijakan ekonomi

35. Sebagaimana dikutip dari Theodore A. Coulombis dan James H. Wolfe, *Pengantar Hubungan Internasional: Keadilan dan Power* (Bandung: Putra A. Bardin, 1999), hlm. 115.
36. W. D. Coplin, *Pengantar Politik Internasional* (Bandung: Sinar Baru, 1992), hlm. 165.
37. Amir MS, *op. cit.*

tersebut dirumuskan berdasarkan kepentingan politik; (3) hubungan ekonomi internasional sebagai hubungan politik, hal ini disadari karena interaksi di dalam ekonomi internasional sama seperti interaksi politik internasional yang mengandung unsur konflik dan kerja sama yang dilakukan oleh *state* maupun *non-state actors* dalam rangka mencapai tujuan bersama.[38]

Uraian konsep di atas dapat memberikan pemahaman bahwa perdagangan antar negara yang merupakan pengejawantahan dari hubungan ekonomi internasional secara tegas merupakan salah satu bagian dari politik luar negeri, sedangkan di dalam politik luar negeri itu sendiri tidak terlepas dari unsur kepentingan nasional.

Melalui pemahaman tersebut, politik luar negeri dapat dikatakan sebagai sebuah *output* yang dirumuskan berdasarkan beberapa pertimbangan yang mencakup kondisi internal (domestik) serta eksternalnya dalam rangka mencapai tujuan nasional suatu negara. Sejalan dengan itu, tujuan nasional yang merupakan tujuan politik luar negeri suatu negara, menurut A.A. Banyu Perwita, cenderung dipengaruhi oleh sasaran yang dilihat dari masa lalu dan aspirasi untuk masa yang akan datang.

Tujuan politik luar negeri dapat dikatakan sebagai citra mengenai keadaan dan kondisi di masa depan suatu negara, di mana pemerintah mampu meluaskan pengaruhnya terhadap negara lain dengan mengubah atau mempertahankan tindakan negara lain.[39] Dilihat dari jangka waktunya, tujuan politik luar negeri dapat bertahan lama dalam suatu periode tertentu dan dapat pula bersifat sementara atau dapat berubah sesuai kondisi waktu tertentu.[40] Artinya, tujuan nasional suatu negara dapat berubah sesuai sasaran yang ingin dicapai berdasarkan *input*

38. Joan E. Spero, *The Politics of Internasional Economic Relations. Fourth edition* (New York: St. Martin's Press, 1990), hlm 4.
39. Perwita dan Yani, *op. cit.*, hlm. 51.
40. *Ibid.*

yang datang dari lingkungan internal dan eksternalnya.

Sedangkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, jangka waktunya bisa berbeda-beda. Mengenai hal ini Kalevi Jaakko Holsti membedakannya ke dalam tiga jangka waktu, yaitu: (1) Tujuan jangka pendek *(short-term)* yaitu tujuan yang cenderung bertolak pada suatu kepentingan atau nilai utama dan identik dengan masalah pertahanan dan keamanan sehingga dapat berubah sesuai dengan perubahan yang terjadi baik di dalam negeri maupun di sekitarnya; (2) Tujuan jangka menengah *(middle-term)* yaitu tujuan yang identik dengan masalah perekonomian seperti peningkatan kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi, peningkatan prestise negara melalui unjuk kemampuan militer, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta masalah bentuk perluasan pengaruh negara yang lazim disebut imperialisme; (3) Tujuan jangka panjang *(long-term)* yaitu tujuan yang menyangkut perencanaan untuk melakukan reorganisasi seluruh dunia atau membentuk tata dunia baru.[41]

Berkaitan dengan itu, untuk mengetahui tujuan nasional yang hendak dicapai suatu bangsa, menurut Soesiswo Soenarko dapat dilihat dari kepentingan nasional yang telah dirumuskan.[42] Juga dilihat dari tiap-tiap keputusan politik luar negeri yang diputuskan serta dilaksanakan yang mewakili kepentingan nasional masing-masing negara. Dengan demikian, kepentingan nasional diartikan sebagai usaha untuk mendeskripsikan pokok alasan yang mempengaruhi atau mendasari tingkah laku negara dalam lingkungan internasional yang mengancam.[43]

41. K.J. Holsti, *Politik Internasional: Kerangka Analisa* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1987), hlm 183-199.
42. Soesiswo Soenarko, "Evaluasi Pelaksanaan Politik Luar Negeri Indonesia," dalam Zainuddin Djafar, *Perkembangan Studi Hubungan Internasional dan Tantangan Masa Depan* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1996), hlm 97.
43. William C. Olson, David S. McLellan, dan Fred A. Sondermann (eds.), *The Theory and Practice of International Relations* (New Jersey: Prentice Hall, 1983), hlm. 35.

Menurut Donald E. Neuchterlein, bidang-bidang yang dijadikan fokus utama dalam rumusan kepentingan nasional meliputi: (1) kepentingan pertahanan *(defence interest)* yang ditujukan suatu negara untuk melindungi dirinya dari ancaman kekerasan fisik negara lain; (2) kepentingan ekonomi *(economic interest)* yang ditujukan untuk meningkatkan perekonomian negara dalam berhubungan dengan negara lainnya; (3) kepentingan ketertiban dunia *(world order interest)* guna memelihara politik internasional dan sistem ekonomi sehingga negara merasa aman serta agar warga negara dan perdagangan dapat beroperasi damai di luar negara, dan (4) kepentingan ideologi *(ideological interest)* dalam rangka melindungi serta mempromosikan nilai-nilai sehingga penduduk suatu negara mengambil bagian dan percaya akan kebaikan yang universal.[44]

Selanjutnya tujuan politik luar negeri yang tercermin dalam perumusan kepentingan nasional suatu negara diapresiasikan melalui peranan negara tersebut di dalam sistem internasional. K.J. Holsti secara eksplisit berpendapat bahwa peranan nasional yang dapat dihubungkan dengan berbagai kebutuhan domestik, sikap-sikap umum dan kondisi eksternal suatu bangsa akan tampak sebagai *output* kebijakan politik luar negeri saat suatu negara terlibat dalam masalah regional atau internasional dan dapat berubah sesuai dengan kebutuhannya.[45]

POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA

Berangkat dari konsep dan definisi yang telah diulas singkat di atas, bisa kita katakan di sini bahwa keberhasilan suatu politik luar negeri mensyaratkan adanya manajemen terpadu atas hubungan luar negeri. Ada tiga aspek penting dalam manajemen

44. Donald E.Nuechterlien, "The Concept of National Interest: A Time for New Approaches," *Journal of World Affair,* musim semi 1997, hlm. 102.
45. Holsti, *op. cit.*, hlm. 170-173.

hubungan luar negeri itu, yaitu: *Pertama,* manajemen hubungan luar negeri harus berlandaskan pada idealisme yang kokoh. Idealisme ini penting karena bersifat relatif konstan dan di dalamnya terkandung falsafah serta hal-hal yang mendasar berupa landasan, prinsip-prinsip, dan tujuan pokok politik luar negeri. *Kedua,* idealisme dalam hubungan luar negeri tersebut perlu diterjemahkan secara tepat sesuai dengan realitas dalam hubungan bilateral, regional, dan global. Intinya, idealisme itu harus tertuang dalam bentuk kebijakan yang realistis sesuai dengan kondisi dan situasi internasional yang dihadapi. *Ketiga,* kebijakan realistis ditempuh dengan berbagai pendekatan pragmatis dalam mengantisipasi gelombang globalisasi.[46]

Komitmen Indonesia dalam menentang kolonialisme dan imperialisme telah ditegaskan oleh para bapak bangsa dan dicantumkan dalam Pembukaan UUD 1945. Inilah landasan prinsip politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Hal ini berarti, pasal-pasal UUD 1945 yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara memberikan garis-garis besar dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Sementara itu, Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia diposisikan sebagai landasan idiil politik luar negeri Indonesia.

Jadi, politik luar negeri Indonesia harus mampu mengimplementasikan idealisme dan landasan-landasan normatif yang tertuang dalam Pancasila, UUD 1945, dan prinsip bebas aktif, ke dalam realitas dinamika interaksi internasional. Nilai-nilai normatif yang diletakkan oleh para pendiri bangsa menjadi tumpuan politik luar negeri Indonesia, dan dalam pelaksanaannya harus mampu melihat dan mengkalkulasikan kenyataan dan harus dapat mengambil langkah-langkah terobosan pragmatis yang diperlukan demi kepentingan nasional.

46. Andre H. Pareira (ed.), *Perubahan Global dan Perkembangan Studi Hubungan Internasional* (Bandung: Parahyangan Center for International Studies [PACIS], 1999), hlm. 299-300.

Karena kebutuhan dalam negeri itu selalu mengalami perkembangan, demikian juga halnya situasi dunia internasional, maka politik luar negeri Indonesia juga senantiasa berubah. Dalam setiap periode pemerintahan terjadi pemaknaan yang bervariasi terhadap prinsip-prinsip yang menjadi landasan politik luar negeri bebas aktif Indonesia.

Pada masa perjuangan kemerdekaan, pergolakan politik internasional saat itu yang memperlihatkan polarisasi kekuatan adidaya (Blok Barat diwakili Amerika Serikat dan Blok Timur diwakili Uni Soviet) mendorong Indonesia menunjukkan sikap dan orientasi politik luar negeri yang independen. Sebagaimana dikemukaan oleh Mohammad Hatta dalam pidato di depan Badan Pekerja KNIP pada 2 September 1948:

> Apakah bangsa Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan harus memilih saja antara pro-Rusia dan pro-Amerika? Apakah tidak ada pendirian lain yang harus diambil dalam mengejar cita-cita bangsa? Pemerintah berpendapat bahwa pendirian yang harus diambil ialah supaya Indonesia jangan menjadi objek dalam pertarungan politik internasional, melainkan ia harus tetap menjadi subjek yang berhak menentukan sikap sendiri… Politik RI harus ditentukan oleh kepentingannya sendiri dan dijalankan menurut keadaan dan kenyataan yang kita hadapi… Garis politik Indonesia tidak dapat ditentukan oleh haluan politik negara lain yang berdasarkan kepentingan negara itu sendiri.[47]

Menurut Hatta, dalam konteks pertentangan antara kedua blok, politik "bebas" berarti Indonesia tidak berada dalam kedua blok dan mempunyai jalannya sendiri untuk mengatasi persoalan internasional, sedangkan "aktif" berarti upaya untuk bekerja lebih giat guna menjaga perdamaian dan meredakan kete-

47. Mohammad Hatta, *Mendayung Antara Dua Karang* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 17. Juga Mohammad Hatta, *Dasar Politik Luar Negeri Republik Indonesia* (Jakarta: Tintamas, 1953), hlm. 11.

gangan kedua blok.[48] Dalam arti lebih luas, bebas juga berarti menolak keterlibatan atau ketergantungan terhadap pihak luar yang dapat mengurangi kedaulatan Indonesia,[49] dan aktif berarti Indonesia siap menjalin kerjasama dengan negara-negara lain yang akan menguntungkan kepentingan nasional Indonesia.

Dikarenakan sikap tersebut, politik luar negeri Indonesia sering disebut berada dalam posisi netral. Namun, Hatta menegaskan bahwa politik luar negeri Indonesia bukanlah politik netral, karena tidak mengacu pada pertikaian global antara AS dan Uni Soviet. Sikap Indonesia tersebut lebih didasarkan atas pertimbangan mandiri untuk memperkukuh dan memperjuangkan perdamaian.[50] Dengan landasan itulah kita bisa memahami dukungan Indonesia pada negara-negara Arab dan penolakan untuk berhubungan dengan Israel.

Hatta merumuskan enam tujuan politik luar negeri Indonesia, yaitu:

1. Untuk mempertahankan kemerdekaan rakyat dan menjaga keamanan negara.
2. Untuk memperoleh barang-barang kebutuhan pokok yang berasal dari luar negeri guna meningkatkan standar hidup masyarakat.
3. Untuk memperoleh modal guna membangun kembali apa yang telah hancur atau rusak, dan modal untuk industrialisasi, konstruksi baru dan mekanisme pertanian.
4. Untuk memperkuat prinsip hukum internasional dan untuk membantu meraih keadilan sosial pada lingkup internasional yang sejalan dengan piagam PBB.
5. Untuk memberikan penekanan khusus pada upaya mem-

48. Mohammad Hatta, "Indonesian Foreign Policy," *Foreign Affairs,* April 1953, hlm. 444. Lihat juga Athiqah Nur Alami, *op. cit.*, hlm. 43.
49. Dewi Fortuna Anwar, "Hatta dan Politik Luar Negeri," *Kompas*, 9 Agustus 2002.
50. Mohammad Hatta, "Indonesian Foreign Policy".

bangun hubungan baik dengan negara tetangga yang pada masa lalu juga mengalami penjajahan.

6. Untuk membangun persaudaraan antar negara melalui realisasi idealita dalam Pancasila, sebagai filosofi dasar bangsa Indonesia.[51]

Hatta menekankan bahwa tujuan-tujuan di atas bukanlah sesuatu yang utopis. Ada beberapa tujuan yang penting untuk saat ini dan yang lainnya lebih berorientasi untuk masa depan.

Politik luar negeri Indonesia tampak mengalami pergeseran orientasi pada masa Soeharto, dengan penekanan dititikberatkan pada peningkatan kondisi ekonomi dan stabilitas politik domestik.[52] Kedua hal ini dianggap bertimbal balik. Pencapaian stabilitas politik dipandang merupakan stimulus positif bagi pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya.

Terkait dengan politik luar negeri, maka pencapaian tujuan ekonomi-politik era Soeharto tersebut sangat bergantung pada tiga hal, yaitu:

1. Peran Indonesia untuk menciptakan lingkungan regional yang kondusif bagi pencapaian kepentingan nasionalnya;
2. Hubungan Indonesia dengan *state actor* dan *non-state actor* lain di dunia internasional, terutama yang memberi kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia; dan
3. Citra Indonesia di dunia internasional.

Terciptanya lingkungan regional yang kondusif merupakan prioritas utama karena Indonesia memerlukan lingkungan yang relatif stabil di sekelilingnya yang dapat membuat Indonesia berkonsentrasi penuh pada pembangunan ekonomi domestik. Usaha-usahanya direalisasikan antara lain dengan mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia, pembekuan hubung-

51. Athiqah Nur Alami, "Landasan dan Prinsip Politik Luar Negeri Indonesia", dalam Ganewati Wuryandari, *Politik Luar Negeri Indonesia: di Tengah Pusaran Politik Domestik* (Jakarta: P2P-LIPI, 2008), hlm. 46.
52. Soesiswo Soenarko, *Evaluasi Pelaksanaan Politik Luar Negeri Indonesia,* hlm. 101.

an diplomatik dengan Republik Rakyat Cina yang dipandang komunis, serta membentuk wadah kerjasama antara negara-negara Asia Tenggara (ASEAN). Berkebalikan dengan Soekarno yang berani menyerukan kemandirian dengan *"Go to hell with your aid!"*, dana-dana asing baik investasi swasta maupun bantuan pembangunan banyak masuk dan diterima oleh Indonesia pada masa Soeharto.

Pasca Orde Baru, Indonesia menekankan kembali pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif dengan didukung diplomasi secara seimbang dan mumpuni untuk meningkatkan perekonomian Indonesia baik dari sektor perdagangan, ekspor-impor, maupun investasi. Di kancah internasional, diharapkan Indonesia tetap mengedepankan kontribusi dan eksistensinya dalam menjaga perdamaian dunia serta kerjasama bilateral, regional, dan multilateral.

Untuk memastikan tercapainya tujuan nasional, Departemen Luar Negeri menekankan pada kerjasama diplomatik dengan negara-negara di dunia internasional dalam seri lingkaran konsentris *(concentric circles)*. Lingkaran pertama adalah ASEAN yang merupakan pilar utama bangsa Indonesia dalam menjalankan politik luar negerinya. Kemudian lingkaran konsentris kedua adalah ASEAN+3 (Jepang, China, Korea Selatan), dan saat ini ASEAN+8 (Australia, Cina, India, Jepang, Korea Selatan, Selandia Baru, Rusia, dan AS) atas pertimbangan *dynamic equilibrium*.[29]

Di luar itu, Indonesia juga mengadakan kerjasama intensif dengan AS dan Uni Eropa yang merupakan partner utama ekonomi Indonesia. Dalam lingkaran konsentris ketiga, Indonesia mengakui pentingnya menggalang kerjasama dengan *like-*

53. *Dynamic equilibrium* adalah konsep yang diaplikasikan oleh Marty Natalegawa melalui kapasitasnya sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia pada Kabinet Indonesia Bersatu jilid 2, yang ditujukan agar tidak ada kekuatan yang mendominasi dalam suatu grup.

minded developing countries.

Karena itulah Indonesia aktif ikut serta dalam keanggotaan Gerakan Non-Blok (GNB), Organisasi Konferensi Islam (OKI), G-77, dan G-15. Dengan forum-forum tersebut, Indonesia dapat menerapkan diplomasinya untuk memperkuat usaha bersama dalam rangka menjembatani kesenjangan antara negara-negara berkembang dengan negara maju. Pada tataran global, Indonesia mengharapkan dan menekankan secara konsisten penguatan multilateralisme melalui PBB, khususnya dalam menyelesaikan segala permasalahan perdamaian dan keamanan dunia. Indonesia juga menolak segala keputusan unilateral yang diambil di luar kerangka kerja PBB.[54]

Dan dalam rangka menghadapi tatanan dunia yang berubah kian cepat, semakin disadari perlunya mengembangkan kelenturan dan keluwesan dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri agar dapat memanfaatkan berbagai tantangan dan peluang yang muncul dari perubahan lingkungan strategis secara optimal. Sehubungan dengan hal itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidato Mei 2005 memperkenalkan konsep baru kebijakan luar negeri "konstruktivis", yang pada intinya dimaksudkan untuk mengembangkan tiga macam kondisi dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia, yaitu:

1. Pola pikir positif dalam mengelola kerumitan permasalahan luar negeri
2. Konektivitas yang sehat dalam urusan-urusan internasional
3. Identitas internasional yang solid bagi Indonesia yang didasarkan pada pencapaian-pencapaian domestik dan diplomatiknya.[55]

54. Moenir Ari Soenanda, "Kepentingan Nasional Indonesia di Dunia Internasional", diakses dari http://www.ditpolkom.bappenas.go.id/?page=news&id=31. 20 April 2011.
55. Makarim Wibisono, *Tantangan Diplomasi Multilateral* (Jakarta: LP3ES, 2006), hlm. 287-288.

METODOLOGI DAN STRUKTUR

Buku ini ditulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Selain data sekunder yang diambil dari bermacam bentuk publikasi seperti buku, jurnal, arsip, media massa, dan berbagai bahan tertulis lainnya, dipakai juga data primer yang didapat melalui wawancara dengan beberapa narasumber yang memiliki kapabilitas berkenaan dengan pokok permasalahan.

Adapun bentuk wawancaranya adalah *in-depth interview* atau wawancara secara mendalam melalui proses *unstandardized interview* yang sering disebut sebagai wawancara tak berencana. Dengan cara seperti ini maka wawancara dilakukan tanpa menggunakan daftar pertanyaan yang disusun sebelumnya serta tidak mengikuti secara ketat urutan maupun susunan kata-kata.

Narasumber untuk penelitian ini antara lain Emanuel Shahaf selaku Ketua Kamar Dagang Israel-Indonesia, Raden Sulistya Widayanta selaku Kepala Sub-direktorat Fasilitasi dan Aturan Perdagangan Direktorat Kerjasama Multilateral Kementerian Perdagangan Indonesia, dan Nanda Avalis selaku Kepala Seksi Lebanon dan Palestina Direktorat Timur Tengah Kementerian Luar Negeri Indonesia.

Bab 1 atau Bab Pendahuluan ini menjabarkan dasar-dasar teori politik luar negeri serta khususnya politik luar negeri Indonesia yang akan menjadi alat analisis untuk menjawab pokok permasalahan yang diajukan. Bab ini juga menjelaskan metodologi serta sistematika penulisan.

Bab 2 akan membahas profil Israel serta sejarah kontak perdagangan antara Israel dengan Indonesia berikut problematikanya. Volume perdagangan yang dihasilkan oleh Indonesia dan Israel dari kontak perdagangan yang telah terjalin akan juga dipaparkan di sini.

Bab 3 akan menganalisa hubungan dagang Indonesia-Israel dalam implementasi politik luar negeri bebas dan aktif yang sebelumnya telah dijelaskan dalam Pendahuluan. Dari hubungan dagang ini akan dilihat kepentingan kedua negara dan dijawab pertanyaan buku ini apakah pembukaan hubungan dagang dengan Israel sesuai dengan implementasi politik luar negeri bebas aktif atau tidak.

2 / Israel dan Hubungan Dagang dengan Indonesia

Sejarah, Perkembangan, dan Volume

BAB KEDUA INI AKAN MEMBAHAS PROFIL ISRAEL BAIK DARI segi potensi domestiknya maupun interaksinya dengan dunia internasional. Terkait dengan itu, akan diketengahkan dan dijelaskan pula persoalan hubungan dagang Indonesia dan Israel dari segi perkembangannya pada tiap-tiap periode pemerintahan di Indonesia. Hubungan dagang ini pada dasarnya menimbulkan kontroversi terutama dalam konteks pelaksanaan politik luar negeri Indonesia dan relevansinya terhadap politik luar negeri bebas aktif.

KONDISI DOMESTIK ISRAEL DAN HUBUNGAN LUAR NEGERINYA

Sejarah Israel

Telah disinggung pada Pendahuluan bagaimana sengketa tentang pendirian Israel timbul oleh adanya klaim teologis dalam sejarah politik Israel. Menurut Taurat, tanah Israel –yang dikenal dalam bahasa Ibrani sebagai *Eretz Yisrael*—dijanjikan oleh Tuhan kepada tiga patriark Yahudi sebagai tanah air mereka. Sekitar abad ke-11 SM, beberapa kerajaan Israel berdiri dan memerintah selama seribu tahun ke depan.

Antara periode Kerajaan-kerajaan Israel dan penaklukan Muslim abad ke-7, tanah Israel jatuh di bawah pemerintahan Asiria, Babilonia, Persia, Yunani, Romawi, Sassania, dan Bizantium. Kegagalan Perang Bar Kokhba untuk melawan Kekaisaran Romawi pada tahun 132 menyebabkan pengusiran besar-besaran orang Yahudi. Populasi Yahudi semakin berkurang ketika pada sekitar tahun 628 atau 629 Kaisar Bizantium memerintahkan pembantaian dan pengusiran orang-orang Yahudi. Tanah Israel direbut dari Kekaisaran Bizantium sekitar tahun 636 oleh penakluk Muslim. Selama lebih dari enam abad, kontrol wilayah tersebut berada di bawah kontrol Umayyah, Abbasiyah, dan Tentara Salib sebelum jatuh di bawah Kesultanan Mameluk pada 1260.[1] Pada 1516, tanah Israel menjadi bagian dari Kesultanan Utsmaniyah, yang memerintah wilayah tersebut sampai abad ke-20.

Lahirnya Zionisme

Diaspora Yahudi telah lama bercita-cita kembali ke Zion dan tanah Israel, namun baru pada 1882 imigrasi skala besar (Aliyah Pertama) berlangsung seiring dengan gagasan gerakan politik Zionisme oleh Theodor Herzl yang bertujuan mendirikan negara Yahudi di tanah Israel.[2] Pada 1896, dalam buku *Der Judenstaat*, Herzl memaparkan visinya tentang negara Yahudi masa depan, dan pada tahun berikutnya ia mengetuai Kongres Zionis sedunia pertama[3] di Basle pada Agustus 1897 dan menghasilkan deklarasi bahwa "Tujuan Zionis ialah untuk mewujudkan sebuah negara Yahudi di Palestina."[4]

1. Lihat lema "Palestine: The Rise of Islam" dan "Palestine: Abbasid Rule", *Encyclopedia Britannica,* 2007.
2. Theodor Herzl, *The Jewish State: An Attempt at a Modern Solution of the Jewish Question* (New York: American Zionist Emergency Council, 1946), hlm. 11.
3. Musthafa Abd. Rahman, *Dilema Israel: Antara Krisis Politik dan Perdamaian* (Jakarta: Penerbit Kompas, 2002), hlm. 4.
4. Lukman Harun, "Partisipasi dan Solidaritas Rakyat Indonesia dalam Mem-

Aliyah Kedua dimulai setelah terjadinya pogrom Kishinev di Rusia pada 1903. Imigran gelombang pertama dan kedua tersebut secara umum adalah Yahudi Ortodoks, namun pada Aliyah Kedua ini mencakup pula para pelopor gerakan *kibbutz*.[5] Pada 1922, Liga Bangsa-Bangsa mempercayakan mandat atas Palestina kepada Inggris Raya.[6] Populasi Palestina saat itu didominasi Arab Muslim, sedangkan pada wilayah perkotaan seperti Yerusalem didominasi orang Yahudi.[7]

Imigrasi Yahudi berlanjut dengan Aliyah Ketiga (1919-1923) dan Aliyah Keempat (1924-1929), yang secara keseluruhan membawa 100.000 orang Yahudi ke Palestina. Pasca kerusuhan Jaffa, Inggris membatasi imigrasi Yahudi dan wilayah yang ditujukan sebagai negara Yahudi dialokasikan di Trans-Yordania.

Meningkatnya gerakan Nazi pada 1930an menyebabkan Aliyah Kelima (1929-1939) dengan masuknya seperempat juta orang Yahudi ke Palestina. Gelombang masuknya Yahudi secara besar-besaran ini menimbulkan Pemberontakan Arab di Palestina 1936-1939, yang memaksa Inggris membatasi imigrasi dengan mengeluarkan Buku Putih 1939. Sebagai reaksi atas penolakan negara-negara dunia untuk menerima pengungsi Yahudi yang melarikan diri dari Holocaust, dibentuklah gerakan bawah tanah Aliyah Bet yang bertujuan untuk membawa orang-orang Yahudi ke Palestina. Pada akhir Perang Dunia II,

bantu Perjuangan Palestina: Pendekatan Sejarah," dalam Riza Sihbudi dan Achmad Hadi (eds.), *Palestina: Solidaritas Islam dan Tata Politik Dunia Baru* (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1992), hlm.117.

5. Amy Romano, *A Historical Atlas of Israel* (New York: Rosen Publishing, 2003), hlm. 30.
6. "League of Nations: The Mandate for Palestine, July 24, 1922". Fordham University, Modern History Sourcebook, 24 Juli 1922. Diakses dari http://www.fordham.edu/halsall/mod/1922 mandate.html. 14 April 2011.
7. V.W. Shaw, *A Survey of Palestine, Vol 1: Prepared in December 1945 and January 1946 for the Information of the Anglo-American Committee of Inquiry* (Washington, D.C.: The Institute for Palestine Studies, 1991 [cetak ulang]), hlm. 148.

jumlah populasi orang Yahudi telah mencapai 33% populasi Palestina, meningkat drastis dari sebelumnya yang hanya 11% pada 1922.[8]

Kemerdekaan dan Awal Pendudukan

Pada 14 Mei 1948, Badan Yahudi memproklamasikan kemerdekaan dan menamakan negara yang didirikan tersebut sebagai "Israel". Sehari kemudian, gabungan lima negara Arab (Mesir, Suriah, Yordania, Lebanon, dan Irak) menyerang Israel, dan pecahlah Perang Arab-Israel 1948.[9] Maroko, Sudan, Yaman, dan Arab Saudi juga membantu mengirimkan pasukan. Setelah setahun pertempuran, genjatan senjata dideklarasikan dan batas wilayah sementara yang dikenal sebagai Garis Hijau ditentukan. Yordania kemudian menganeksasi wilayah yang dikenal sebagai Tepi Barat dan Yerusalem Timur, sedangkan Mesir mengontrol Jalur Gaza. Israel kemudian diterima sebagai anggota PBB pada 11 Mei 1949. Selama konflik ini, sekitar 711.000 orang Arab Palestina (80% populasi Arab) mengungsi keluar Palestina.[10]

Pada masa-masa awal kemerdekannya, gerakan Zionisme buruh yang dipimpin oleh PM David Ben-Gurion mendominasi politik Israel.[11] Periode ini ditandai dengan imigrasi massal para penyintas Holocaust dan orang-orang Yahudi yang dulu

8. "The Population of Palestine Prior to 1948", MidEastWeb, diakses dari http://www.mideastweb. org/palpop.htm. 14 April 2011.
9. "Part 3: Partition, War and Independence". *The Mideast: A Century of Conflict,* National Public Radio, 2 Oktober 2002, diakses dari http://www.npr.org/news/specials/mideast/ history/history3.html. 10 April 2011.
10. Catatan Resmi Sidang Umum PBB, Sesi ke-5, Supplemen No. 18, Document A/1367/Rev. 1, "General Progress Report and Supplementary Report of the United Nations Conciliation Commission for Palestine, Covering the Period from December 11, 1949 to October 23, 1950". The United Nations Conciliation Commission.
11. Lustick Ian, *For the Land and the Lord: Jewish Fundamentalism in Israel* (New York: Council on Foreign Relations Press, 1988), hlm. 37.

diusir dari tanah Arab. Populasi Israel meningkat dari 800.000 menjadi 2.000.000 dalam jangka waktu 10 tahun (1948-1958). Kebanyakan pengungsi ditempatkan di perkemahan-perkemahan yang dikenal sebagai *ma'abarot*. Hingga 1952, 200.000 imigran bertempat tinggal di kota kemah ini. Adanya desakan untuk menyelesaikan krisis ini memaksa Ben-Gurion menandatangani perjanjian antara Jerman Barat dengan Israel. Perjanjian ini menimbulkan protes besar kaum Yahudi yang tidak setuju Israel berhubungan dengan Jerman.[12]

Selama 1950an, Israel terus menerus diserang oleh militan Palestina yang kebanyakan berasal dari Jalur Gaza yang diduduki oleh Mesir.[13] Pada 1956, Israel bergabung dalam aliansi rahasia bersama Inggris Raya dan Perancis yang bermaksud merebut kembali Terusan Suez yang sebelumnya dinasionalisasi oleh Mesir. Walau berhasil merebut Semenanjung Sinai, Israel dipaksa mundur atas tekanan dari Amerika Serikat dan Uni Soviet sebagai ganti atas jaminan hak pelayaran Israel di Laut Merah dan Terusan Suez.

Konflik dengan Negara-negara Arab dan Kesepakatan Damai

Negara-negara Arab selama bertahun-tahun menolak hak pendirian Israel. Pada 1967, Mesir, Suriah, dan Yordania menutup perbatasannya dengan Israel dan memblokade akses Israel ke Laut Merah. Israel kemudian melancarkan serangan terhadap pangkalan Angkatan Udara Mesir yang berujung pada Perang Enam Hari yang dimenangkan oleh Israel. Pada perang ini, Israel berhasil merebut Tepi Barat, Jalur Gaza, Semenanjung Sinai, dan Dataran Tinggi Golan.[14] Antara wilayah

12. Colin Shindler, *The Land Beyond Promise: Israel, Likud and the Zionist Dream* (London: I.B.Tauris, 2002), hlm. 49-50.
13. Martin Gilbert, *The Routledge Atlas of The Arab-Israeli Conflict 8th ed.* (London: Routledge, 2005), hlm. 58.
14. Derek Smith, *Deterring America: Rogue States and the Proliferation of Weapons of Mass Destruction* (Cambridge: Cambridge University Press, 2006), hlm. 126.

administrasi Israel dengan wilayah pendudukannya ditarik penanda yang disebut Garis Hijau. Batas wilayah Yerusalem juga diperluas dengan memasukkan wilayah Yerusalem Timur. Resolusi Dewan Keamanan PBB 478 akhirnya menyatakan bahwa hal ini tidak sah dan melanggar hukum internasional.

Kegagalan negara-negara Arab pada perang 1967 kemudian menyebabkan tumbuhnya gerakan kemerdekaan Palestina oleh Organisasi Pembebasan Palestina (*Palestinian Liberation Organization* atau PLO). Pada akhir 1960an dan awal 1970an, beberapa kelompok militer Palestina melancarkan gelombang serangan terhadap warga Israel di seluruh dunia, termasuk pembunuhan atlet-atlet Israel pada Olimpiade Munich 1972.[15] Israel membalas dengan melancarkan Operasi Murka Tuhan *(Wrath of God)* yang melacak dan membunuh orang-orang yang bertanggung jawab terhadap peristiwa Munich.[16]

Pada hari Yom Kippur 6 Oktober 1973 yang merupakan hari suci Yahudi, pasukan Mesir dan Suriah melancarkan serangan mendadak terhadap Israel. Meski Israel berhasil memukul balik pasukan Mesir dan Suriah, perang yang berakhir pada 26 Oktober ini dianggap sebagai kekalahan Israel. Pemilihan Knesset 1977 menandai terjadinya titik balik dalam sejarah perpolitikan Israel. Pada pemilihan ini, Menachem Begin yang berasal dari Partai Likud mengambil alih kontrol pemerintahan dari Partai Buruh.[17] Pada tahun itu pula, Presiden Mesir Anwar El Sadat berkunjung ke Israel dan berpidato di depan Knesset. Aksi ini dilihat sebagai pengakuan kedaulatan Israel yang pertama oleh negara Arab. Dua tahun kemudian, Sadat dan

15. Edmund L. Andrews and John Kifner, "George Habash, Palestinian Terrorism Tactician, Dies at 82", *The New York Times,* 27 Januari 2008.
16. Terry Crowdy, *The Enemy Within: A History of Espionage* (Oxford: Osprey Publishing, 2006), hlm. 333. Peristiwa ini diangkat ke layar lebar oleh sutradara kenamaan Steven Spielberg dalam film *Munich* (2005).
17. Ahron Bregman, *A History of Israel* (London: Palgrave Macmillan, 2002), hlm. 169-170.

Menachem Begin menandatangani Persetujuan Camp David dan Perjanjian Damai Israel-Mesir.[18] Israel menarik mundur pasukannya dari Semenanjung Sinai dan setuju untuk bernegosiasi membahas otonomi warga Palestina yang berada di luar Garis Hijau, namun rencana tersebut tidak pernah diimplementasikan. Pemerintahan Begin mendukung warga Israel bermukim di Tepi Barat, yang mengakibatkan konflik dengan warga Palestina di daerah tersebut.

Pada 7 Juni 1981, Israel membombardir reaktor nuklir Osirak milik Irak pada Operasi Opera. Badan intelijen Israel, Mossad, mencurigai reaktor nuklir tersebut akan digunakan Irak untuk mengembangkan senjata nuklir. Pada 1982, Israel melakukan intervensi pada Perang Saudara Lebanon untuk menghancurkan basis-basis PLO di Israel Utara. Intervensi ini kemudian berkembang menjadi Perang Lebanon Pertama. Israel menarik pasukannya dari Lebanon pada 1986. Intifada Pertama pecah pada 1987 yang menyebabkan terjadinya kekerasan di daerah pendudukan Israel dengan lebih dari 1.000 orang tewas selama 6 tahun berikutnya.[19] Selama Perang Teluk 1991, PLO dan kebanyakan warga Palestina mendukung Saddam Hussein dan Irak dalam melancarkan serangan misil terhadap Israel.[20]

Pada 1992, Yitzhak Rabin menjadi Perdana Menteri Israel setelah memenangkan pemilu legislatif Israel. Yitzhak Rabin dan partainya mendukung kompromi dengan tetangga-tetangga Israel.[21] Setahun kemudian, Shimon Peres dan Mahmoud

18. Bregman, *Ibid.*, hlm. 186.
19. Russell A. Stone dan Walter P. Zenner, *Critical Essays on Israeli Social Issues and Scholarship* (New York: SUNY Press, 1994), hlm. 246.
20. Clyde Haberman, "After 4 Years, Intifada Still Smolders", *The New York Times,* 9 Desember 1991. Dan lihat juga Hamid Mowlana, George Gerbner and Herbert I. Schiller, *Triumph of the File: The Media's War in the Persian Gulf — A Global Perspective* (Boulder: Westview Press, 1992), hlm. 111.
21. Bregman, *op. cit.*, hlm. 236.

Abbas, mewakili Israel dan PLO, menandatangani Persetujuan Oslo. Yitzhak Rabin dan Yasser Arafat berjabat tangan, dipantau oleh Bill Clinton, pada penandatanganan Persetujuan Oslo pada 13 September 1993.

Persetujuan ini memberikan Otoritas Nasional Palestina hak untuk memerintah di Tepi Barat dan Jalur Gaza.[22] Pada 1994, Perjanjian Damai Israel-Yordania ditandatangani, membuat Yordania menjadi negara Arab kedua yang melakukan normalisasi hubungan dengan Israel.[23]

Namun dukungan publik Arab terhadap persetujuan damai menurun setelah terjadinya peristiwa pembantaian umat Muslim yang sedang bersembahyang di Masjid Ibrahimi oleh sekelompok ekstremis gerakan Kach. Selain itu, pemukiman warga Israel di daerah pendudukan yang masih berlanjut, serta menurunnya kondisi ekonomi Palestina berdampak juga menurunkan dukungan publik Arab. Dukungan publik Israel terhadap persetujuan ini juga berkurang setelah terjadinya rentetan kasus bom bunuh diri yang dilakukan oleh Hamas. Pembunuhan Yitzhak Rabin yang dilakukan oleh ekstremis Yahudi saat ia tengah meninggalkan pawai perdamaian dengan Palestina mengejutkan seluruh dunia.

Pada akhir 1990an, Israel yang dipimpin oleh Benjamin Netanyahu menarik mundur pasukannya dari Hebron dan menandatangai Memorandum Sungai Wye. Memorandum tersebut memberikan kontrol yang lebih luas kepada Otoritas Nasional Palestina.

Ehud Barak yang merupakan Perdana Menteri terpilih pada pemilu 1999 memulai pemerintahannya dengan menarik

22. "Declaration of Principles on Interim Self-Government Arrangements", U.S. Department of State. 13 September 1993, diakses dari http://www.state.gov/p/nea/rls/22602.htm.
23. Robert E. Harkavy dan Stephanie G. Neuman, *Warfare and the Third World* (London: Palgrave Macmillan, 2001), hlm. 270.

mundur pasukan Israel dari Lebanon Selatan dan melakukan negosiasi dengan Ketua Otoritas Palestina Yasser Arafat dan Presiden AS Bill Clinton pada Juli 2000.[24] Negosiasi tersebut gagal, dan Intifada Kedua pun dimulai.

Ariel Sharon menjadi Perdana Menteri Israel yang baru setelah memenangi pemilu 2001. Pada masa pemerintahannya, Sharon secara sepihak menarik mundur pasukan Israel dari Jalur Gaza dan membangun dinding pemisah di perbatasan Tepi Barat. Pada Januari 2006, setelah Ariel Sharon terkena stroke dan berada dalam keadaan koma, kekuasaannya digantikan oleh Ehud Olmert.

Pada Juli 2006, serangan Hisbullah ke Israel Utara beserta penculikan dua tentara Israel memicu terjadinya Perang Lebanon Kedua. Peperangan ini diakhiri dengan gencatan senjata yang disponsori oleh Dewan Keamanan PBB dengan mengeluarkan Resolusi PBB 1701.

Akhir Desember 2008, gencatan senjata berakhir setelah Hamas kembali meluncurkan serangan roket. Israel merespons dengan serangan udara.[25] Pada 3 Januari 2009, pasukan Israel memasuki Gaza dan memulai serangan darat. Pada 17 Januari 2009, Israel mengumumkan gencatan senjata secara sepihak dengan syarat dihentikannya serangan roket dan mortir. Hal ini kemudian diikuti oleh Hamas yang juga mengumumkan gencatan senjata dengan syarat ditariknya pasukan Israel dari Gaza serta dibukanya kembali perbatasan.

Sistem Politik dan Pemerintahan

Israel merupakan negara republik penganut demokrasi parlementer yang meliputi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Parlemen Israel beranggotakan 120 orang yang dikenal

24. James L. Gelvin, *The Israel-Palestine Conflict: One Hundred Years of War* (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), hlm. 240.
25. "Israeli jets pound Hamas", *The Sydney Morning Herald,* 29 Desember 2008.

sebagai Knesset. Anggota-anggota Knesset berasal dari berbagai partai yang lolos pemilu parlemen dan pemerintahan yang terbentuk cenderung merupakan pemerintahan koalisi.[26]

Ambang batas perolehan satu kursi di Knesset adalah minimal 2% dari jumlah pemilih (naik dari 1% sebelum 1992 dan 1,5% pada 1992–2003). Dari sekian banyak partai politik di Israel, yang besar dan berpengaruh adalah Partai Kadima (dengan tokoh Tzipi Livni), Partai Buruh (dengan tokoh Shimon Peres, Yitzhak Rabin, Ehud Barak), dan Partai Likud (dengan tokoh Yitzhak Samir, Ariel Sharon, Benjamin Netanyahu).[27]

Pemilu parlemen dijadwal setiap empat tahun sekali, namun koalisi pemerintahan yang tidak stabil ataupun mosi tidak percaya oleh Knesset seringkali membubarkan pemerintahan lebih awal. Rata-rata masa satu era pemerintahan Israel adalah 22 bulan. Kerapkali, masalah perdamaian dengan Palestina, peranan agama dalam negara, dan skandal-skandal politik mengakibatkan pemilu diadakan lebih cepat.[28]

Presiden, sebagai kepala negara, dipilih oleh Knesset sebagai simbol pemersatu, tugas-tugasnya sangat terbatas dan hanya bersifat seremonial. Anggota parlemen yang didukung oleh mayoritas anggota parlemen dapat dicalonkan sebagai Perdana Menteri dan ditentukan berdasarkan suara terbanyak. Tetapi biasanya jabatan Perdana Menteri otomatis diemban oleh ketua partai terbesar. Perdana Menteri berfungsi sebagai kepala pemerintahan dan ketua kabinet.

26. "The Electoral System in Israel." Diakses dari http://www.knesset.gov.il/description/eng/eng_mimshal_beh.htm, 15 April 2011.
27. Partai Likud cenderung dikenal sebagai "garis keras" yang ingin menyelesaikan konflik dengan mengusir orang Palestina sepenuhnya dari Israel, sementara Partai Buruh dengan ideologi progresif-egalitariannya cenderung lebih menghormati bangsa Arab dan menghendaki penyelesaian konflik secara damai.
28. Carol Migdalovitz, *Israel: Background and Relations with the United States, Report to Congress,* Congressional Research Service, pemutakhiran terakhir 8 September 2008, hlm. 23.

Pertumbuhan Ekonomi

Israel salah satu negara termaju di Asia Barat Daya dalam pembangunan ekonomi dan industri. Negara ini menduduki peringkat nomor 3 di kawasan tersebut menurut Indeks Kemudahan Berbisnis Bank Dunia[29] dan Laporan Daya Saing Global Forum Ekonomi Dunia.[30] Sejak 1970an, Israel telah menerima bantuan ekonomi dari Amerika Serikat, dan pinjaman dari Amerika Serikat tersebut menduduki proporsi utang luar negeri Israel yang cukup besar. Pada 2007, Amerika Serikat menyetujui bantuan dana sebesar AS$30 miliar kepada Israel untuk sepuluh tahun ke depan. Pada 2007, Israel diundang untuk bergabung ke dalam Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama antar negara-negara yang menjunjung prinsip-prinsip demokrasi dan ekonomi pasar bebas.

Dalam hal Produk Domestik Bruto, Israel menduduki peringkat ke-39 di dunia pada 2009.[31] Israel memiliki peringkat Indeks Pembangunan Manusia, kebebasan pers, dan daya saing ekonomi yang tertinggi dibandingkan negara-negara Arab di sekitarnya.

Peningkatan tajam ekspor Israel terjadi pada kuartal keempat 2008 yang mencapai 35,6% dan kuartal pertama 2009 yang mencapai 28,6%.[32] Awal 2010, peningkatan ekspor pada kuartal kedua mencapai 15,8%, sedangkan impor mencapai 8,3%.[33] Komoditas ekspor utama Israel meliputi buah-buahan, sayur-

29. "Economy Rankings — Middle East & North Africa". The World Bank Group. Diakses dari http://www.doingbusiness.org/economyrankings/default.aspx?regionid=4. 15 April 2011.
30. "Global Competitiveness Report 2006-2007". World Economic Forum. 14 Februari 2007. Diakses dari http://www.weforum.org/en/initiatives/gcp/Global%20Competitiveness%20Report/index.htm.
31. "Total GDP 2009" The World Bank. Diakses dari http://siteresources.worldbank.org/ DATASTATISTICS/Resources/GDP.pdf, Juni 2011.
32. Data dari http://www.traveldocs.com/index.php?page=about-israel-2#economy.
33. *Ibid.*

sayuran, obat-obatan, piranti lunak, bahan-bahan kimia, bahan bakar fosil, bahan-bahan mentah, teknologi dan peralatan militer, serta intan.[34]

Amerika Serikat merupakan mitra dagang Israel terbesar. Pada 2009, hubungan dagang bilateral kedua negara mencapai AS$ 22,3 miliar. Di samping itu, Israel juga menjalin hubungan dagang dan perjanjian perdagangan bebas dengan Uni Eropa, Turki, Kanada, Meksiko, Yordania, Mesir.[35] Selain itu, pada 18 Desember 2007, Israel menjadi negara pertama di luar negara-negara Amerika Latin yang menandatangani perjanjian perdagangan bebas dengan Blok Dagang Mercosur.[36]

Sebagian besar PDB Israel dibelanjakan untuk keperluan pertahanan. Dalam catatan statistik, Israel menganggarkan belanja pengembangan militernya sebesar AS$9.110.000.000 per tahun.[37] Israel adalah negara dengan teknologi militer ultra-modern, yang selain memiliki senjata nuklir juga memiliki senjata pemusnah massal lainnya berupa senjata biologi dan kimia.

Hubungan Diplomatik dan Kebijakan Luar Negeri

Israel memiliki hubungan diplomatik dengan 161 negara dan 94 misi diplomatik di seluruh dunia.[38] Hanya tiga negara Liga Arab yang telah menormalisasi hubungan dengan Israel, yaitu Mesir (1979), Yordania (1994), dan Mauritania (1999). Dua anggota Liga Arab, Maroko dan Tunisia, yang menjalin hu-

34. Data ini saya dapatkan dari Emanuel Shahaf, ketua Kamar Dagang Israel-Indonesia, pada 12 Desember 2010 dalam dokumen berjudul "Israel: Not Just a Country, a State of Mind."
35. *Ibid.*
36. *Ibid.*
37. Herry Nurdi, *Membongkat Rencana Israel Raya* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), hlm. 6.
38. "Israel's Diplomatic Missions Abroad: Status of Relations". Israel Ministry of Foreign Affairs. 12 Juli 2006, diakses dari http://www.mfa.gov.il/MFA/About%20the%20Ministry/Diplomatic%20missions/Israel-s%20Diplomatic%20Missions%20Abroad. 14 April 2011.

bungan diplomatik terbatas dengan Israel memutuskan hubungan diplomatik tersebut pada awal Intifada Kedua tahun 2000. Sejak 2003, hubungan Israel dengan Maroko mulai membaik.

Akibat Perang Gaza 2009, Mauritania, Qatar, Bolivia, dan Venezuela menghentikan hubungan politik dan ekonomi dengan Israel. Di bawah hukum Israel, Lebanon, Suriah, Arab Saudi, Irak, dan Yaman adalah negara musuh dan warga negara Israel dilarang berkunjung ke negara tersebut tanpa seizin Kementerian Dalam Negeri Israel. Sejak 1995, Israel merupakan anggota Dialog Mediterania, yang bertujuan meningkatkan kerja sama antara tujuh negara yang terletak di cekungan Mediterania dan negara anggota NATO.

Hubungan luar negeri Israel dengan Amerika Serikat, Turki, Jerman, Britania, dan India merupakan yang paling dekat. Amerika Serikat merupakan negara pertama yang mengakui berdirinya Israel, diikuti oleh Uni Soviet. Amerika Serikat menganggap Israel sebagai sekutu utamanya di Timur Tengah.[39]

Turki dan Israel tidak memiliki hubungan diplomatik penuh hingga 1991. Namun, Turki telah melakukan kerjasama dengan Israel sejak pengakuannya terhadap kemerdekaan Israel pada 1949. Karena Turki juga berhubungan baik dengan negara-negara Arab di Timur Tengah, beberapa kali Turki mendapatkan tekanan agar memutuskan hubungan dengan Israel. Hubungan kedua negara surut ketika Turki mengutuk serangan Israel ke Gaza pada 2009.

Jerman juga menjalin hubungan kuat dengan Israel. Kerjasama kedua negara ini meliputi kerjasama di bidang sains, pendidikan, ekonomi, dan militer.[40] India membuka hubungan diplo-

39. "Israel: Background and Relations with the United States Updated". Defense Technical Information Center, diakses dari http://www.dtic.mil/cgi-bin/GetTRDoc?AD=ADA470003 &Location =U2&doc=GetTRDoc.pdf. 15 April 2011.
40. "Germany and Israel". Background Papers, Kedutaan Besar Jerman di AS, Washington, D.C, diakses dari http://www.germany.info/relaunch/info/

matik penuh dengan Israel pada 1992. Hubungan diplomatik Israel dengan Iran berlangsung semasa Dinasti Pahlavi, namun pengakuan Iran ditarik kembali semenjak Revolusi Iran 1978.

Israel juga memiliki hubungan dengan Indonesia, namun hanya pada tataran kontak dagang tanpa memiliki hubungan diplomatik.

KEBIJAKAN LUAR NEGERI ISRAEL

Politik luar negeri Israel dijalankan berdasarkan kepentingan dalam negerinya, yang menurut Andersen (1982) bisa dibagi dalam tiga fase, yaitu:

1. Fase pertama saat Israel disibukkan dengan pendirian negara dan membutuhkan pengakuan internasional. Hubungan luar negeri dijalankan sesuai dengan kebutuhan ini.
2. Fase kedua saat politik Israel lebih menitikberatkan pada kepentingan domestik. Pembangunan dalam negeri bergantung pada keamanan daerah pendudukan dan perbatasan. Politik *"carrot and stick"* dijalankan dalam berhubungan dengan negara lain. Politik *"carrot"* dijalankan terhadap negara yang mau bernegosiasi dan bekerjasama dengan Israel, sedangkan politik *"stick"* untuk menunjukkan bahwa Israel superior di bidang militer.
3. Fase ketiga saat Israel menerapkan politik luar negeri yang lebih pragmatis.[41]

Adapun langkah "pragmatis" seperti janji memberikan wilayah terbatas lebih dimaksudkan untuk mendapatkan simpati dunia agar Israel tetap berdiri dan memperkuat eksistensinya.

archives/background/israel.html. 14 April 2011.

41. Setiawan Eko Nugroho, "Yahudi-Zionis-Israel?", http://www.mailarchive.com/itb@itb.ac.id/msg10036.html.

Politik luar negerinya pun tidak lepas dari peran lobi-lobi (bisnis/politik) Yahudi di berbagai negara, termasuk AS.

Sebuah artikel berjudul "A Strategy for Israel in the Nineteen Eighties" mencantumkan rencana Israel untuk Timur Tengah dan dunia Islam. Artikel tulisan Oded Yinon ini awalnya terbit dalam bahasa Ibrani di sebuah jurnal Zionis, namun diterjemahkan ke bahasa Inggris dan disebarluaskan oleh seorang Yahudi anti-Zionis, Israel Shahak, seminggu sebelum serangan Israel ke Lebanon, 6 Juni 1982.[42] Dengan itu terbongkarlah dua strategi besar yang akan menjadi penopang utama rencana Zionis Israel di dunia Islam yaitu: *Pertama,* Israel harus membangun diri sebagai negara terkuat di tingkat regional. Artinya, Israel harus sangat berpengaruh pada negara-negara Arab secara politik, lobi, dan terutama militer. *Kedua,* harus terjadi pemecahbelahan negara-negara di dunia Islam, terutama Timur Tengah dan Asia Selatan, agar menjadi negara-negara kecil, lemah, berbasis kesukuan dan terikat pada sentimen sektarian.

Inilah respons Israel atas kondisi obyektif dan dinamisnya, maksimalisasi potensi untuk mencapai kepentingan nasional, dan upaya menutupi kelemahan dengan ongkos semurah-murahnya. Setidaknya ada empat rencana strategis Israel, yaitu:

1. Superioritas Militer

   Kondisi objektif dan dinamis mendorong Israel untuk menggariskan doktrin keunggulan militernya melampaui negara-negara Arab. Israel berupaya keras memadukan berbagai model pembangunan militer yang paling tangguh di dunia: perang darat model Jerman, perang udara model AS, dan mobilisasi massa model Perancis. Belum lagi ditambah dengan upaya memonopoli senjata nuklir.

42. Oded Yinon, "A Strategy for Israel in the Nineteen Eighties," *KIVUNIM: A Journal for Judaism and Zionism,* No. 14, musim dingin, 5742, Februari 1982. Diterjemahkan oleh Israel Shahak. Bisa dibaca di http://www.monabaker.com/pMachine/more.php?id=A2298_0_1_0_M

2. Kepentingan Ekonomi
   Untuk mengatasi keterbatasan sumber daya alamnya, Israel menetapkan tujuan pembangunan ekonomi dengan bertumpu pada superioritas iptek. Di samping itu, melalui proyek "Timur Tengah Baru" Israel menginginkan kawasan Timur Tengah menjadi suatu unit ekonomi yang terpadu. Berbekal superioritas industri dan teknologi, Israel setidaknya dapat mengurangi beban kompleks industrinya yaitu dengan menjadikan kawasan Timur Tengah sebagai pasar yang luas.
3. Pencapaian Perdamaian di Kawasan
   Sejak 1990an, Israel menempatkan pencapaian perdamaian sebagai salah satu prioritas dan berani memberikan konsesi demi prioritas ini. Pertimbangannya cukup jelas, karena masalah terpenting Israel adalah *survival* negara-bangsa serta pertahanan-keamanannya. Cara paling "aman" untuk meraihnya adalah melalui perdamaian dengan negara-negara yang dipandang sebagai sumber ancaman.
4. Citra dan Peran Internasional Israel
   Sebagai negara dengan banyak masalah dalam pergaulan internasional, Israel tetap memandang upaya-upaya untuk meningkatkan *bargaining position* dan perannya di dunia internasional sebagai kepentingan nasional yang amat mendasar.[43]

HUBUNGAN DAGANG INDONESIA-ISRAEL

Dalam konteks hubungan internasional, terutama hubungan antarnegara dan pelaksanaan politik luar negeri serta pencapaian kepentingan nasional, kerjasama di bidang apapun sewajar-

43. Ibnu Burdah, *op. cit.*, hlm. 113-114.

nya dilakukan untuk saling menguntungkan masing-masing negara bersangkutan. Akan tetapi tidak semua hubungan antarnegara direspons positif baik dari dalam negeri maupun tanggapan dunia internasional, termasuk dalam hal ini hubungan dagang antara Israel-Indonesia.

Oleh karena itu, dalam bab ini dipandang perlu diketengahkan sejarah dan perkembangan hubungan dagang Indonesia-Israel per periode pemerintahan sehingga ditemukan signifikansi mengapa hubungan dagang tersebut dijalin dan dilegalkan, terutama dari sudut pandang Indonesia.

Periode Soekarno (1945-1965)

Meskipun Israel pada paruh kedua 1940an dapat dibilang tengah memperjuangkan kemerdekaannya, namun Indonesia tidak memandangnya dalam barisan sesama negara pascakolonial. Israel dipandang sebagai kekuatan kolonial lama. Karena itulah, dalam konflik dengan negara baru Israel, Presiden Soekarno lebih menekankan hubungan dengan negara-negara Arab, terutama yang terlibat dalam perjuangan kemerdekaan.

Misi diplomatik pertama Indonesia ke Timur Tengah dikirim melalui Wakil Menteri Luar Negeri Agus Salim sebagai tanggapan terhadap resolusi Liga Arab 18 November 1946 yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Agus Salim mendirikan konsuler dan hubungan diplomatik dengan Mesir, juga mengunjungi Suriah dan Arab Saudi untuk menandatangani perjanjian serupa. Hubungan tersebut membuahkan hasil di forum internasional berupa dukungan negara-negara Arab bagi Indonesia ketika perjuangan kemerdekaan Indonesia dibahas di PBB.[44]

Kebijakan Indonesia yang pro-Arab dan anti-Israel tampak dalam pelbagai indikasi berikut. Pada Desember 1949, pasca

44. Asia Division to director-general, 10 July 1952, ISA/MFA 2559/7; Ya'acov Shimoni, Asia Today, Tel Aviv, Izreel, 1961.

Konferensi Meja Bundar, Presiden Chaim Weizmann dan PM David Ben-Gurion mengirim telegram kepada Soekarno dan Muhammad Hatta untuk mengucapkan selamat kepada Indonesia atas pengakuan kemerdekaan oleh Belanda. Pada Januari 1950, Menteri Luar Negeri Moshe Sharett mengirim telegram kepada Muhammad Hatta guna memberitahukan bahwa Israel telah memutuskan untuk memberikan pengakuan Indonesia secara penuh. Namun Hatta menanggapi Sharett dan Ben-Gurion hanya dengan ucapan terima kasih dan tidak memberikan sentimen timbal balik dalam hal pengakuan diplomatik. Pada Juni 1952, pers Arab dan Pakistan –mengutip kantor berita *Antara*— melaporkan bahwa pemerintah Indonesia tidak berniat mengakui Israel karena mayoritas warganya adalah Muslim dan karena dukungan yang telah diberikan negara-negara Arab untuk Indonesia selama perjuangan kemerdekaan.[45]

Namun pada Februari 1953, Reuven Barkat, Kepala Departemen Politik Histadrut Serikat Buruh Israel, masih bisa berkunjung ke Indonesia dan bertemu dengan sejumlah tokoh masyarakat. Pada saat yang sama, Duta Besar Indonesia Subandrio bertolak ke London untuk mendekati mitra Israelnya, Eliahu Elat, dalam tugas melakukan kunjungan tidak resmi dan mempelajari kontribusi apa yang bisa diberikan Israel bagi pembangunan negara-negara Asia umumnya, dan Indonesia khususnya, serta untuk mencari solusi atas ketegangan Arab-Israel. Pada Juli 1953, Sekretaris Jenderal Partai Sosialis Indonesia mengunjungi Israel sebagai tamu Reuven Barkat. Pada November 1953, Indonesia tidak lagi memberikan visa masuk kepada warga Israel, awalnya hanya untuk mereka yang memiliki paspor diplomatik dan kemudian kepada seluruh warga Israel.

Selain itu, sikap Soekarno yang menolak gagasan dominasi kapitalis vs. sosialis dalam Perang Dingin bermuara pada

45. *Ibid.*

sikap non-blok dan digelarnya Konferensi Afrika Asia di Bandung pada April 1955, tanpa partisipasi Israel. Indonesia dan Pakistan menentang partisipasi Israel dan mampu meyakinkan pemerintah Burma, India, dan Srilanka, yang awalnya mendukung Israel dapat mengambil bagian, agar berubah pikiran.

Pada 2 November 1956, parlemen Indonesia mengutuk serangan di Mesir terkait krisis Suez dan merekomendasikan pemutusan hubungan diplomatik dengan Inggris dan Perancis. Indonesia saat itu juga terlibat penuh dalam mendukung deklarasi anti-Israel di PBB dan forum internasional lainnya. Di samping sebagai bentuk Solidaritas Muslim, hal tersebut juga sebagai upaya untuk mempertahankan dukungan Arab terhadap masalah Irian Barat.[46]

Periode Soeharto (1966-1998)

Dukungan untuk negara-negara Arab dan keengganan memformalkan hubungan dengan Israel telah secara luas dilembagakan dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Namun pasca diturunkannya Soekarno dari tampuk pemerintahan, Jenderal Soeharto menempatkan kebijakan Indonesia terhadap konflik Arab-Israel pada jalan yang lebih moderat. Simpati untuk Arab dan kritik untuk Israel memang terus disampaikan oleh Indonesia dalam forum-forum diplomatik, namun Indonesia juga sekaligus menyerukan pendekatan yang lebih pragmatis dan moderat untuk negara-negara Arab, sikap yang jelas kontras dengan mayoritas negara-negara Arab pada saat itu.

Selain itu, penekanan Soeharto pada keunggulan angkatan bersenjata dalam urusan pertahanan dan keamanan telah menyebabkan terjadinya transaksi "jalur belakang" antara militer Indonesia dan Israel. Menurut laporan pers September 1979, Indonesia menandatangani perjanjian pembelian 33 pesawat A-

46. *Ibid.*

4 Skyhawk dan 11 helikopter dari angkatan udara Israel.[47]

Pada 1982, Indonesia mengakui secara terbuka telah menjalin kesepakatan dengan Israel melalui Amerika Serikat sebagai pihak ketiga, namun pada saat yang sama diplomat Indonesia terus secara terbuka mengecam aneksasi Israel dari Golan dan militer RI juga diterjunkan ke Lebanon.

Pada akhir 1980an, saat kritik terhadap rezim Orde Baru makin meningkat, Soeharto memutuskan memakai strategi merangkul kelompok-kelompok Muslim dalam negeri dan menunjukkan apresiasi terhadap masalah-masalah dunia Islam. Ia secara resmi mengakui "negara Palestina," dan kantor PLO dibuka di Jakarta pada 1990. Pada 1992, Indonesia bertindak sebagai ketua Gerakan Non-Blok dan kemungkinan reaksi negatif dari negara-negara Arab dikesampingkan dalam hal normalisasi hubungan dengan Israel.

Pada Juni 1993, Menteri Luar Negeri Israel Shimon Peres dan Ali Alatas bertemu secara informal pada Konferensi Hak Asasi Manusia PBB di Wina. Selama percakapan singkat mereka, Peres mengatakan Israel tertarik untuk membangun hubungan diplomatik terbuka dengan Indonesia. Menteri Luar Negeri Indonesia dilaporkan menjawab bahwa normalisasi hubungan akan menjadi mungkin jika ada kemajuan dalam pembicaraan perdamaian dan konflik Arab-Israel kurang lebih terselesaikan. Duta Besar Israel untuk Singapura, Daniel Megido, menindaklanjuti pertemuan Peres-Alatas dengan pertemuan informal sendiri dengan rekan di Jakarta dari Departemen Luar Negeri. Secara signifikan, Menteri Pertahanan Indonesia Edi Sudrajat mengatakan Indonesia akan mempertimbangkan normalisasi hubungan dengan Israel asalkan proses perdamaian berjalan baik dan kepentingan Palestina tidak terganggu, dan jika semua

47. Dikutip dari Rizki Ridyasmara, *Fakta dan Data Yahudi di Indonesia Era Reformasi* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), hlm. 33.

negara Arab menjalin hubungan diplomatik dengan Israel, Indonesia pasti akan melakukan hal yang sama.[48]

Penandatanganan Deklarasi Prinsip antara Israel dan PLO pada September 1993 membuka pintu baru dalam hubungan antara Israel dan Muslim Asia. Apalagi, Cina dan India telah menjalin hubungan diplomatik penuh dengan Israel. Pada 1996, dinyatakan secara resmi Indonesia tidak akan membuka hubungan bilateral dengan Israel sebelum terjadi perdamaian menyeluruh di Timur Tengah.

Dari kronologi di atas, terlihat adanya keinginan kuat beberapa kalangan pemerintahan saat itu untuk menjajaki kemungkinan dibukanya hubungan bilateral dengan Israel. Dan setiap kali usulan itu mengemuka, kalangan Muslim Indonesia serta merta menyampaikan keberatannya. Beberapa upaya aktif Israel untuk menjajaki hubungan dengan Indonesia antara lain:

- Pada Juni 1993, pertemuan Shimon Peres dengan Ali Alatas pada konferensi HAM di Wina.
- Pada awal Oktober 1993, momen kedatangan Ben Ari sebagai delegasi Israel pada sidang WTO di Denpasar.
- Pada 15 Oktober 1993, kunjungan PM Yitzhak Rabin ke kediaman Soeharto.
- Pada Januari 1994, kunjungan 5 orang senator AS untuk mendesak Indonesia agar membuka hubungan bilateral dengan Israel.
- Pada 1994, tersiar berita bahwa 2 perusahaan Israel (Alhit dan BVR) ingin membangun pangkalan udara di Indonesia. Berita ini kemudian dibantah oleh Jenderal TNI Edi Sudrajat.
- Pada Februari 1994, Israel mengundang 4 wartawan Indonesia (*Republika, Media Indonesia, Business Weekly,* dan *Eksekutif*). Dalam wawancara eksklusif itu, PM Rabin me-

48. *Sunday Times,* 27 Juni 1993 dan *Jakarta Post,* 28 Juni 1993.

nyatakan keinginannya agar hubungan bilateral dengan Indonesia segera diwujudkan. Rabin sempat “membuka rahasia” bahwa pertemuannya dengan Soeharto sebelumnya telah dicapai “kesepakatan” bahwa secara bertahap Indonesia-Israel akan menciptakan kondisi, misalnya melalui hubungan bisnis bagi timbulnya hubungan yang lebih baik.

- Akhir Oktober 1994, Abdurrahman Wahid (NU), Habib Chizrin (Muhammadiyah), Djohan Effendi (Departemen Agama), dan A. Bondan Gunawan berkunjung ke Israel. Sepulang dari Israel, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur lantang menyerukan agar pemerintah RI membuka hubungan diplomatik dengan Israel, “Sudah waktunya Indonesia menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Dengan demikian kita akan lebih berperan untuk membantu perjuangan bangsa Arab.”
- Pada November 1994, mantan Menlu AS Henry Kissinger berkunjung ke Jakarta. Kissinger dikenal sebagai pendukung utama doktrin *“Israel first”* dalam kebijakan luar negeri AS di Timur Tengah.[49]

Dengan demikian bisa kita lihat, semasa pemerintahan Presiden Soeharto Indonesia diam-diam telah melakukan hubungan dagang dengan Israel. Hubungan dagang ini melibatkan agen-agen intelijen kedua belah pihak yang mengurus bidang perbisnisan. Neraca perdagangan Indonesia dengan Israel dan negara-negara lain di Timur Tengah semasa Orde Baru bisa dilihat pada Tabel 2.1 di halaman 58-59.

Periode Abdurrahman Wahid (1999-2001)

Tiga hari setelah terpilih menjadi presiden pada 20 Oktober

49. Setiawan Eko Nugroho, *op. cit.*

1999, KH. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pergi ke Bali untuk memenuhi komitmen menghadiri konferensi bisnis internasional. Pada kesempatan tersebut, Gus Dur menyatakan bahwa Indonesia harus mengikuti jejak beberapa negara Arab dan mendirikan kedutaan komersial di Israel.

Beberapa minggu kemudian, Gus Dur menghadiri pertemuan dari Konferensi Dunia tentang Agama dan Perdamaian di Amman, Yordania, dan singgah di Teluk Persia untuk menjelaskan kebijakannya yang ingin merangkul Israel. Gus Dur menerima berbagai delegasi dari instansi pemerintah Israel, termasuk kunjungan Direktur Jenderal Departemen Perdagangan dan Industri, Departemen Luar Negeri, juga dari kelompok-kelompok semacam American Jewish Committee (AJC) dan Australia/Israel & Jewish Affairs Council (AIJAC).

Dunia Arab cemas oleh langkah itu, namun Gus Dur segera menetralisirnya dalam pertemuan dengan 16 duta besar negara-negara Arab di Jakarta. Gus Dur menegaskan bahwa Indonesia tidak akan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel kecuali setelah negara Palestina berdiri dan Israel mundur dari Dataran Tinggi Golan serta Lebanon Selatan.[50]

Alwi Shihab selaku Menteri Luar Negeri RI saat itu juga menegaskan bahwa Indonesia tidak akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel selama Israel belum mengakui kemerdekaan rakyat Palestina. Komentar Shihab yang dikutip *Reuters* menambahkan bahwa, *"The plan to open trade ties with Israelis only an appeal instead of a government policy."*[51]

Gus Dur melihat bahwa pembukaan hubungan dagang dengan Israel sama sekali tidak bersangkut paut dengan agama Islam. Gus Dur siap melakukan hubungan dagang dengan pihak mana pun tanpa melihat paham dan ideologi yang dianut

50. Musthafa Abd. Rahman, *op. cit.*, hlm. 149.
51. Dikutip dari Herry Nurdi, *op. cit.*, hlm. 371-372.

oleh pihak tersebut.[52] Pada kesempatan lain, ketika berbicara di hadapan para pengusaha Singapura pada 6 November 1999, Gus Dur menyatakan tegas:

> Sebab itu tidak selayaknya kita mempersoalkan segala sesuatu dari sudut agama. Kepentingan nasional kita jauh lebih penting dari yang lain. Adapun mengenai masalah agama itu sendiri, saya rasa, agama itu luas sekali. Sering agama dipersempit dengan mengedepankan penafsiran sebagai kebenaran. Ini tidak boleh.[53]

Sikap moderat Gus Dur ini tentu merupakan harapan baru bagi terjalinnya kontak Israel-Indonesia yang telah dirintis oleh mendiang PM Yitzhak Rabin namun terputus pada masa pemerintahan PM Benjamin Netanyahu.

Bahkan dalam sebuah wawancara dengan media Barat, Gus Dur mengatakan bahwa dirinya merasa lebih dekat dengan Israel dibanding dengan negara-negara Arab dan dunia Islam:

> Jika saya ditanya, saya akan terus terang pada Anda, bahwa Israel jauh lebih dekat di hati saya dibanding dengan negara-negara ini (Arab dan Islam). Terutama karena Israel punya teknologi yang bisa menarik investasi, sedangkan negara-negara ini tidak punya apa-apa yang bisa ditunjukkan kecuali kemiskinan dan kesengsaraan.[54]

Pada 1 Februari 2000, Menteri Perdagangan Jusuf Kalla mengeluarkan peraturan untuk mencabut hambatan ekspor dan pemasaran barang-barang atau hasil bumi Indonesia yang awalnya dihambat oleh Keputusan Menteri Perdagangan No.102/SK/VIII/1967.[55] Selanjutnya, kontak perdagangan Indonesia-

52. Rizki Ridyasmara, *op. cit.*, hlm. 70.
53. "Gus Dur: Negara Kesatuan RI Tak Berdasar Agama," *Suara Pembaruan,* 7 November 1999. Lihat juga *ibid.*, hlm. 70-71.
54. Dikutip dari Herry Nurdi, *op. cit.*, hlm. 371.
55. Lihat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 26/MPP/Kep/II/2000 tertanggal 1 Februari 2000, dalam Lampiran 1.

Israel dilegalkan tahun berikutnya ketika Menteri Perindustrian dan Perdagangan dijabat oleh Luhut Panjaitan, melalui surat keputusan yang kutipannya sebagai berikut:

> Perihal: Surat Keterangan Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 26/MPP/Kep/II/2000 tanggal 1 Februari 2000 tentang Pelaksanaan Peraturan-peraturan di Bidang Kebijakan Ekspor dan Pemasaran Barang-barang Produksi Indonesia, perlu disampaikan bahwa saat ini tidak ada lagi hambatan atau larangan secara hukum untuk perusahaan Indonesia melakukan hubungan dagang dengan perusahaan Israel dan sebaliknya.[56]

Surat keputusan tersebut secara jelas menyatakan bahwa pemerintah Indonesia secara resmi tidak lagi memberlakukan pelarangan hubungan dagang antara Israel dan Indonesia. Dengan itu pihak Indonesia maupun Israel lebih leluasa untuk melakukan transaksi perdagangan tanpa hambatan apapun.

Sebagai realisasi dari legalisasi hubungan dagang tersebut, dijalin kerjasama antara Credit Risk Insurance Assure of Israel dan Asuransi Jasindo dari Indonesia. Selain itu, hubungan bisnis juga terjalin melalui Israindo dan Indolink.

Jasindo merupakan perusahaan pertama Indonesia yang melakukan hubungan dagang secara formal dengan Israel setelah larangan dicabut. Jasindo memegang asuransi ratusan BUMN, dan pada 1997 atas mandat Menteri Keuangan, Jasindo bisa memberikan kredit ekspor plus asuransinya untuk mendukung perusahaan-perusahaan lokal. Artinya, di Indonesia semakin banyak perusahaan kecil melakukan hubungan dagang dengan Israel.

Israindo, dalam situs resminya, menyatakan sebagai Israindo Strategic Busniness Solution merupakan agen konsultasi

56. Lihat surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No.23/MPP/01/2001 dalam Lampiran 2.

yang mengemas strategi dan cara berpromosi perdagangan di sektor swasta antara Israel dan Indonesia.[57] Adapun cakupan kegiatan Israindo sebagai berikut:

- Mempromosikan peluang-peluang perdagangan antara para pengusaha Israel dan Indonesia
- Membangun jembatan komunikasi yang lebih baik agar terjadi saling kesepahaman antara pengusaha Israel dan pengusaha Indonesia
- Melayani pengusaha yang tertarik dengan peluang berdagang di kedua negara dalam hal kepengurusan birokrasi di kedua negara
- Memberikan pemahaman tentang sejarah dan budaya yang kaya yang dimiliki kedua negara

Sementara itu, Indolink memiliki visi misi membantu orang Indonesia menjalin kerjasama strategis saling menguntungkan dengan pengusaha Israel; memberikan layanan menyeluruh bagi para importir dan distributor Indonesia untuk bekerjasama dengan pemasok dari Israel; menjalankan program penetrasi pasar secara komprehensif dan terencana; dan Indolink berperan sebagai agen bisnis orang Indonesia di Israel.[58]

Sebagai tambahan, pada 2002, dibentuklah Indonesia Israel Public Affairs Committee (IIPAC) yang merupakan lobi perdagangan antara pengusaha-pengusaha Indonesia dan Israel. Beroperasi dari kantornya di Jakarta Selatan, IIPAC beranggotakan 19 pengusaha dari Indonesia dan Israel.[59]

Periode Susilo Bambang Yudhoyono (2004-sekarang)

Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Indonesia menunjukkan keterlibatan lebih aktif di

57. Rizki Ridyasmara, *op. cit.*, hlm. 73.
58. *Ibid.*, hlm. 77.
59. "IIPAC Launches Indonesia Business Lobby", *Jakarta Post,* 29 Januari 2010.

kawasan Timur Tengah sebagaimana terlihat dalam partisipasi pasukan Indonesia dalam kontingen PBB di Lebanon Selatan. Pada September 2005 berlangsung pertemuan yang menjanjikan antara Menteri Luar Negeri Israel Silvan Shalom dan Menteri Luar Negeri Indonesia Hassan Wirajuda, namun bukan untuk membina hubungan diplomatik. Hubungan diplomatik penuh dengan Israel tetap bukan prioritas utama. Meski demikian, volume perdagangan kedua negara terus meningkat.

Pada 2006, sebuah misi dagang Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) berkunjung ke Israel dan Ketua Kadin M.S. Hidayat menandatangani perjanjian ekonomi kedua negara. Hal ini menegaskan bahwa telah terjalin kontak intensif di sektor perdagangan. Sebagaimana dinyatakan oleh Presiden Israel Manufactures Association, Shraga Brosh, "Indonesia bisa menjadi pasar utama bagi ekspor barang-barang Israel ke Asia Tenggara."[60] M.S. Hidayat juga mengatakan bahwa kerjasama kedua negara dapat membantu perusahaan-perusahaan Israel melakukan kegiatan di Indonesia.[61]

Israel juga membentuk Kamar Dagang Israel-Indonesia yang berpusat di Tel Aviv pada 2009. Kamar dagang tersebut diketuai oleh Emanuel Shahaf. Adapun tujuan dari kamar dagang tersebut yaitu:

1. Mempromosikan hubungan bisnis dan komersial Israel-Indonesia di seluruh tingkatan.
2. Mendukung perusahaan-perusahaan Israel yang ingin mengembangkan bisnisnya di Indonesia dengan informasi dan saran-saran yang relevan.
3. Mendukung perusahaan-perusahaan Indonesia yang mencari produk-produk, teknologi dan mengenal pasar Israel.
4. Mengatur acara dan peluang-peluang jaringan.

60. Dikutip dari Faisal M. Sakrie, *Melacak Yahudi Indonesia: Dari Maskapai Dagang VOC Sampai Jejak Fisik dan Pemikiran* (Yogyakarta: Bale Siasat, 2008), hlm. 122.
61. *Ibid.*

5. Mengadakan perjalanan dan seminar-seminar.
6. Mengawasi urusan legal dan lingkungan bisnis dan tetap menginformasikan pada anggota-anggota mengenai perkembangan yang relevan.

Pada Januari 2010, Indonesia Israel Public Affairs Committee (IIPAC) yang terbentuk pada 2002 meluncurkan Lobi Bisnis Indonesia, yang bertujuan memfasilitasi investasi Yahudi dari seluruh dunia ke Indonesia. Direktur eksekutif IIPAC Benjamin Ketang menyatakan komitenya akan bekerjasama dengan American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) yang bermarkas di Australia dan siap menghadapi keberatan-keberatan dari kelompok Muslim bila ada.[62]

VOLUME PERDAGANGAN INDONESIA-ISRAEL

Suka atau tidak suka, dengan segala kontroversinya hubungan dagang Indonesia-Israel memang telah terjalin untuk sekian lama dengan volume perdagangan yang terus meningkat.

Menurut data Badan Pengembangan Ekspor Nasional (BPEN), yang berada di bawah Menteri Perdagangan Indonesia, nilai ekspor Indonesia ke Israel antara 1999-2003 sebesar AS$32.670.000, sedangkan nilai ekspor Indonesia ke seluruh dunia untuk produk yang sama sebesar AS$44.817.784.000. Sementara nilai ekspor Israel ke Indonesia antara 1999-2003 sebesar AS$9.972.000, sedangkan nilai ekspor Israel ke seluruh dunia untuk produk yang sama sebesar AS$15.234.281.000.[63]

62. "IIPAC Launches Indonesia Business Lobby", *Jakarta Post,* 29 Januari 2010.
63. Data dari "ITC calculation based on COMTRADE statistics," BPEN, 2005, dikutip dari Imam Marsudi, *Pandangan Partai-partai Politik Indonesia terhadap Prospek Formalisme Hubungan Dagang Indonesia-Israel,* Tesis Studi Kajian Timur Tengah dan Islam, Pascasarjana Universitas Indonesia, 2005.

Dari data tersebut, skor tertinggi nilai ekspor Indonesia ke Israel adalah air mineral, minyak, dan produk penyulingan, yakni sebesar AS$17.069.000. Sedangkan Indonesia mengekspor ke berbagai negara lainnya untuk komoditi yang sama sebesar AS$15.712.977.000 dan kebutuhan Israel untuk produk ini sebesar AS$3.759.095.000. Nilai terendah ekspor Indonesia ke Israel adalah mutiara, batu mulia, baja, koin, yaitu sebesar AS$11.000, sedangkan nilai ekspor Indonesia ke negara-negara lain sebesar AS$379.440.000 dan kebutuhan Israel untuk produk jenis tersebut sebesar AS$8.005.111.000.

Sementara itu, skor tertinggi nilai ekspor Israel ke Indonesia adalah penyamakan, bahan celup dan zat pewarna yakni sebesar AS$3.291.000, sedangkan ekspor Israel ke berbagai negara lainnya untuk komoditi yang sama sebesar AS$96.044.000 dan kebutuhan Indonesia untuk produk jenis tersebut sebesar AS$352.378.000. Nilai ekspor yaitu keras, bahan dasar kertas, bubur kertas sebesar AS$11.000. Sedangkan, kebutuhan Indonesia untuk produk jenis tersebut sebesar AS$329.300.000 dan nilai ekspor Israel untuk produk tersebut ke negara-negara lain sebesar AS$134.008.000.

Dalam kategori non migas, sampai 2003 ekspor Indonesia-Timur Tengah dengan nilai sebesar AS$47.406.819.000 dan nilai impornya sebesar AS$447.005.000.[64] Ada kemungkinan, produk Indonesia yang diekspor ke negara-negara Timur Tengah diekspor kembali ke Israel. Dan sebaliknya, produk yang dihasilkan oleh Israel besar kemungkinan juga diekspor ke Indonesia melalui negara-negara Timur Tengah. Hal ini terjadi karena ada beberapa negara Timur Tengah seperti Qatar,

64. "Prospek Hubungan Ekonomi dan Perdagangan Indonesia-Timur Tengah," makalah yang disampaikan dalam rangka Temu Ahli Membahas mengenai Peran Indonesia di Kawasan Timur Tengah, di Solo, Jawa Tengah, 15-16 Februari 2005. Pusat Pengembangan Pasar Wilayah Afrika dan Timur Tengah (P3WATT), BPEN, Depdag, Jakarta, 2005.

Oman, dan Yordania yang memiliki hubungan dagang dengan Indonesia dan hubungan dagang dengan Israel.

Saat menjabat PM Ehud Olmert mencabut semua perizinan ekspor ke Indonesia dan Malaysia. Barang-barang yang tidak memerlukan izin ekspor tersebut antara lain produk komunikasi, elektronik, dan produk di bidang kesehatan, obat-obatan dan peralatan medis.[65] Pada 2002, nilai ekspor ke Indonesia dan Malaysia mencapai angka AS$280 juta. Sedangkan angka impor dengan Malaysia sebesar AS$17 juta dan impor dengan Indonesia senilai AS$55 juta.[66]

Data volume perdagangan Indonesia-Israel selama 2005 mencapai AS$154 juta. Dari nilai ini, Israel hanya mengekspor AS$14 juta, sedangkan Indonesia mengekspor AS$140 juta ke Israel, terutama untuk barang-barang elektronik, plastik, dan karet. Israel menargetkan volume perdagangan ke Indonesia akan mencapai AS$600 juta pada 2010.[67] Namun target volume tersebut sudah terlampaui pada 2008.

Menurut Emanuel Shahaf, Ketua Kamar Dagang Israel-Indonesia, perdagangan langsung gabungan antara Indonesia dan Israel pada 2008 senilai sekitar AS$750 juta.[68] Lebih dari puluhan juta dolar dihasilkan oleh perdagangan tidak langsung dari perusahaan Israel melalui negara-negara ketiga sehingga total adalah lebih dari AS$800 juta. Ekspor langsung Israel tetap sangat rendah pada AS$16.000.000 ketika mempertimbangkan ukuran ekonomi dan potensi. Angka tersebut terutama dihasilkan oleh sejumlah kecil proyek *hi-tech*.

Soy Martua Pardede, anggota Dewan Penasehat Kadin yang pernah menjabat Ketua Perdagangan Luar Negeri Kadin,

65. Herry Nurdi, *op. cit.*, hlm. 370.
66. *Ibid.*
67. Faisal M. Sakrie, *op. cit.*, hlm. 123.
68. "Israel-Indonesia Relation", diakses dari www.israelasiacenter.org/page/4545735010. 17 April 2011.

juga membenarkan bahwa hubungan dagang Indonesia-Israel lebih banyak dilakukan lewat jalur tidak langsung atau negara ketiga. Buah-buahan misalnya. Indonesia tidak membeli langsung dari Israel melainkan dari Singapura. "Jadi, yang berdagang langsung dengan Israel adalah Singapura," menurut Soy Martua.[69] Demikian pula ekspor Indonesia ke Israel, seperti tekstil, elektronik, alat rumah tangga, dan minyak kelapa sawit. Semua itu diperdagangkan lewat Abu Dhabi dan Yordania.

Data yang diperoleh dari pemberitahuan ekspor atau impor barang (PEB atau PIB) berdasarkan *Certificate of Origin* (CoO) masing-masing negara secara implisit menunjukan bahwa baik pemerintah maupun swasta dari kedua belah pihak secara intensif telah melakukan kontak dagang dengan jalan tukar menukar produk. Karena itu wajar bila volume perdagangan secara keseluruhan terus meningkat dengan dibukanya ataupun dilegalkannya hubungan dagang dengan Israel. Angka tersebut bisa makin meningkat tajam jika kontak intensif dan berkelanjutan telah secara resmi dibuka.

69. Dikutip dari Ahmad Munjin, "Pasar Ekspor Israel Tak Terpengaruh", inilah.com, 10 Januari 2009.

Tabel 2.1 Neraca Perdagangan Indonesia dengan Negara-negara Timur Tengah semasa Orde Baru, 1986-1991 (dalam ribu AS$)

NEGARA	1986					1987					1988					1989				
	EKSPOR			IMPOR	SELISIH	EKSPOR			IMPOR	SELISIH	EKSPOR			IMPOR	SELISIH	EKSPOR	IMPOR		SELISIH	
	NON MIGAS	MIGAS	TOTAL			NON MIGAS	MIGAS	TOTAL			NON MIGAS	MIGAS	TOTAL			NON MIGAS	MIGAS	TOTAL		
TIMUR TENGAH	196,904.0	0.0	196,304.0	678,526.4	(482,222.4)	202,390.8	0.0	202,390.8	673,010.0	(470,916.2)	378,121.7	0.0	378,121.7	682,169.3	(304,047.6)	559,659.0	0.0	559,659.0	825,465.0	(265,806.0)
Irak	1,970.2	0.0	1,970.2	115.3	1,854.9	4,554.8	0.0	4,554.8	609.9	3,944.9	7,008.3	0.0	7,008.3	18,575.3	(11,567.0)	127,504.9	0.0	127,504.9	298,800.6	(171,295.7)
Iran	3,417.9	0.0	3,417.1	676.6	2,740.5	13,703.2	0.0	13,703.2	288.4	13,414.8	12,277.5	0.0	12,277.5	39,926.5	(270,649.0)	36,418.5	0.0	36,418.5	179,229.4	(142,810.9)
Saudi Arabia	98,755.9	0.0	98,755.9	638,650.8	(539,894.9)	92,550.3	0.0	92,550.3	630,529.1	(537,978.8)	170,046.4	0.0	170,046.4	565,192.8	(395,146.3)	184,427.4	0.0	184,427.4	223,065.1	(38,637.7)
Israel	10.2	0.0	0.2	524.8	(516.6)	0.0	0.0	0.0	22.7	(227.7)	0.0	0.0	0.0	977.5	(977.5)	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5
Kuwait	5,786.0	0.0	9,786.0	672.9	9,113.1	15,021.5	0.0	15,021.5	6.1	15,045.4	34,789.1	0.0	34,789.1	49.0	34,748.2	40,806.9	0.0	40,806.9	308.5	40,698.0
Yordania	14,930.7	0.0	14,930.7	26,068.9	(11,138.2)	21,665.2	0.0	21,665.2	32,426.5	(10,761.3)	28,317.8	0.0	28,317.8	33,781.1	(5,463.3)	18,928.3	0.0	18,928.3	47,894.7	(28,966.4)
Aden	3,615.5	0.0	3,615.5	0.7	3,614.8	1,926.0	0.0	1,926.0	1.9	1,924.1	2,479.4	0.0	2,479.4	0.0	2,479.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
R.R. Dem. Yaman	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,306.1	0.0	1,306.1	0.5	1,305.6
Libanon	858.5	0.0	858.5	103.2	755.3	713.5	0.0	713.5	69.9	643.6	4,967.9	0.0	4,967.9	75.8	4,892.1	3,836.7	0.0	3,836.7	80.7	3,756.0
Palestina	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	87.7	(87.7)
Yaman	5,660.9	0.0	5,660.9	0.0	5,660.9	5,525.6	0.0	5,525.6	47.3	5,478.3	4,244.4	0.0	4,244.4	56.8	4,187.6	5,861.6	0.0	5,861.6	193.8	5,667.8
Oman	3,285.4	0.0	3,285.4	0.3	3,285.1	1,944.2	0.0	1,944.2	7.0	1,937.2	7,345.1	0.0	7,345.1	1.5	7,343.6	4,980.1	0.0	4,980.1	93.8	4,886.3
Suriah	42.4	0.0	42.4	32.8	9.6	1,834.1	0.0	1,834.1	6.2	1,827.9	3,729.4	0.0	3,729.4	27.1	3,702.3	558.0	0.0	558.0	5.7	552.3
Turki	1,371.3	0.0	1,371.3	5,136.4	(3,765.1)	5,216.2	0.0	5,216.2	4,126.8	1,089.4	3,974.0	0.0	3,974.0	12,963.8	(8,989.8)	6,627.1	0.0	6,627.1	15,078.8	(8,451.7)
Pers. Emirat Arab	43,747.0	0.0	43,747.0	372.4	43,374.6	31,588.4	0.0	31,588.4	484.1	31,104.3	886,530.8	0.0	886,530.8	2,031.6	84,499.1	116,684.3	0.0	116,684.3	2,070.0	114,614.3
Qatar	223.1	0.0	223.1	3,576.6	(3,353.5)	168.0	0.0	168.0	1,617.1	(1,449.1)	2,373.7	0.0	2,373.7	3,588.2	(1,214.5)	2,114.1	0.0	2,114.1	4,558.8	(2,444.7)
Bahrain	4,991.0	0.0	4,991.0	2,077.6	2,913.4	2,312.7	0.0	2,312.7	692.9	1,619.8	4,011.7	0.0	4,011.7	4,011.7	155.0	3,856.7	0.0	3,391.1	1,410.1	1,981.0
Siprus	2,843.2	0.0	2,843.2	72.8	2,770.4	3,444.3	0.0	3,444.3	294.1	3,150.2	4,522.2	0.0	4,522.2	978.1	3,544.1	5,625.9	0.0	5,625.9	227.1	5,398.6
Lainnya	795.5	0.0	795.5	444.4	351.1	222.9	0.0	222.9	1,779.9	(1,557.0)	1,504.0	0.0	1,504.0	3,789.3	(2,285.3)	588.0	0.0	588.0	11,176.6	(10,588.6)

NEGARA	1990					Jan-Okt 1990										% PERUBAHAN 1990-1991 (JAN-Okt)	
	EKSPOR			IMPOR	SELISIH	EKSPOR			IMPOR	SELISIH	EKSPOR			IMPOR	SELISIH	IMPOR	SELISIH
	NON MIGAS	MIGAS	TOTAL			NON MIGAS	MIGAS	TOTAL			NON MIGAS	MIGAS	TOTAL				
TIMUR TENGAH	696,554.5	2,145.6	698,700.1	1,266,548.4	(567,848.3)	588,854.1	0.0	588,854.1	1,028,795.2	(439,941.2)	775,749.6	8.1	775,757.7	777,006.2	(1,248.6)	31.74	-24.47
Irak	83,794.8	0.0	83,794.8	177,784.5	(93,989.7)	83,134.5	0.0	83,134.5	177,313.3	(94,178.7)	334.6	0.0	334.6	10,616.5	(10,281.9)	-99.60	-94.01
Iran	54,358.5	0.0	54,358.5	611,442.8	(557,084.3)	47,970.8	0.0	47,970.8	445,682.4	(397,711.6)	81,177.1	0.0	81,177.1	138,813.8	(57,639.7)	69.22	-68.85
Saudi Arabia	320,623.8	2,145.6	322,769.4	364,522.2	(41,752.8)	264,653.3	0.0	264,653.3	300,894.9	(36,241.6)	377,534.0	0.0	377,534.0	524,343.3	(146,809.3)	42.65	74.26
Israel	65.7	0.0	65.7	0.0	65.7	65.7	0.0	65.7	0.0	65.7	5.0	0.0	5.0	0.0	0.0	-92.40	-
Kuwait	32,267.9	0.0	32,267.9	22,614.8	9,653.1	31,664.4	0.0	31,664.4	22,534.9	9,129.3	6,338.8	0.0	6,388.8	441.1	5,899.9	-79.92	-93.54
Yordania	15,381.6	0.0	15,381.6	54,827.5	(39,445.9)	12,698.5	0.0	12,698.5	50,997.9	(38,299.4)	16,781.3	0.0	16,781.3	50,559.9	(33,778.6)	32.51	-0.86
Aden	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-
R.R. Dem. Yaman	1,592.4	0.0	1,592.4	42.8	1,549.6	997.0	0.0	997.0	42.5	954.5	2,421.5	0.0	2,421.5	0.0	2,421.5	142.87	-100.00
Libanon	3,582.1	0.0	3,582.1	130.1	3,452.0	2,649.8	0.0	2,649.8	58.9	2,590.9	10,041.8	0.0	10,041.8	491.3	9,550.6	278.96	733.58
Palestina	0.0	0.0	0.0	245.7	(245.7)	0.0	0.0	0.0	245.7	(245.7)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-100.00
Yaman	9,852.0	0.0	9,852.0	605.9	9,246.1	8,868.5	0.0	8,868.5	605.9	8,262.5	12,330.2	0.0	12,330.2	9.8	12,320.5	39.03	-98.39
Oman	4,170.4	0.0	4,170.4	242.7	3,927.7	3,355.8	0.0	3,366.8	242.7	3,113.2	5,329.5	0.0	5,329.5	10.6	5,318.9	85.81	-95.65
Suriah	3,221.6	0.0	3,221.6	4.2	3,217.4	1,639.7	0.0	1,217.8	4.2	1,635.5	10,852.7	0.0	10,852.7	79.2	10,773.6	561.89	1,791.28
Turki	9,892.3	0.0	9,892.3	16,032.1	(6,139.8)	5,238.9	0.0	5,239.9	15,003.0	(9,764.1)	12,825.4	0.0	12,825.4	19,311.0	(6,485.6)	144.81	28.71
Pers. Emirat Arab	140,836.7	0.0	140,836.7	1,386.0	139,450.7	111,836.3	0.0	111,836.3	1,109.8	110,726.5	219,540.1	0.0	219,540.1	3,408.5	216,139.8	96.31	207.13
Qatar	1,640.2	0.0	1,640.2	4,325.1	(2,684.9)	1,252.6	0.0	1,252.6	4,283.8	(3,031.1)	2,969.0	0.0	2,969.0	3,405.4	(436.5)	137.02	-20.50
Bahrain	4,710.5	0.0	4,710.5	9,213.3	(4,502.8)	4,123.4	0.0	4,123.4	6,653.7	(2,530.3)	6,681.1	0.0	6,681.1	22,971.9	(16,290.8)	62.03	245.25
Siprus	9,880.1	0.0	9,880.1	0.7	9,879.4	8,037.3	0.0	8,037.3	0.1	8,036.9	8,846.2	0.0	8,846.2	0.9	8,845.3	10.06	101.57
Lainnya	683.9	0.0	683.9	3,127.8	(2,443.9)	667.4	0.0	667.4	3,121.2	(2,453.9)	1,741.3	0.0	1,741.3	2,543.3	(802.0)	160.91	-81.52

Sumber: BPS, dikutip dari Soedradjad Djiwandono, *Perdagangan dan Pembangunan : Tantangan, Peluang dan Kebijaksanaan Perdagangan Luar Negeri Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1992).

Tabel 2.2 Ekspor Indonesia ke Israel

HS	Nama Produk	Ekspor Indonesia ke Israel					Jan-Jul 2008	Jan-Jul 2009	Perubahan (%)	Share (%) 08
		2004	2005	2006	2007	2008				
	TOTAL	**3276855**	**1200727**	**0**	**124133**	**94376389**	**51235645**	**36887203**	**-28.00**	**100.00**
03	Fish, crustaceans, molluscs, aquatic invertebrates nes	83200	47953	0	0	3453300	1751805	1500567	-14.34	3.66
06	Live tree & other plant; bulb, root; cut flowers	3574	2779	0	0	3761	3761	1862	-50.49	0.00
08	Edible fruit and nuts; peel of citrus fruit or me	0	0	0	0	11050	0	7540	0.00	0.01
09	Coffee, tea, mati and spices.	52927	50140	0	0	1212767	456461	589879	29.23	1.29
11	Milling products, malt, starches, inulin, wheat gluten	0	0	0	0	26975	26975	0	-100.00	0.03
13	Lac, gums, resins, vegetable saps and extracts nes	0	0	0	0	385	0	17921	0.00	0.00
15	Animal,vegetable fats and oils, cleavage products, etc	0	0	0	0	464322	219111	216765	-1.07	0.49
16	Prep of meat, fish or crustaceans, molluscs etc	0	0	0	0	255812	143542	136040	-5.23	0.27
17	Sugars and sugar confectionery.	86520	15940	0	0	735063	327687	499471	52.42	0.78
18	Cocoa and cocoa preparations.	0	0	0	0	64039	30239	30400	0.53	0.07
19	Cereal, flour, starch, milk preparations and products	0	0	0	0	654041	348578	533249	52.98	0.69
20	Prep of vegetable, fruit, nuts or other parts of	108231	198609	0	0	3193106	1722641	777670	-54.86	3.38
25	Salt, sulphur, earth, stone, plaster, lime and cement	0	0	0	0	117	0	0	0.00	0.00
27	Mineral fuels, oils & product of their distillati	0	0	0	0	13947478	5364987	0	-100.00	14.78
29	Organic chemicals.	335439	0	0	0	2059359	1188741	1391778	17.08	2.18
30	Pharmaceutical products.	8732	0	0	0	0	0	100	0.00	0.00
32	Tanning, dyeing extracts, tannins, derivs.pigments etc	0	0	0	0	335683	230016	5404	-97.65	0.36
33	Essential oils & resinoids; perf, cosmetic/toilet	0	0	0	0	74	0	0	0.00	0.00
34	Soaps, lubricants, waxes, candles, modelling pastes	20448	13003	0	0	199311	158529	105732	-33.30	d
35	Albuminoidal subs; modified starches; glues; enzy	0	588	0	0	9616	2427	1636	-32.59	0.01
38	Miscellaneous chemical products.	0	23000	0	0	153618	143112	90800	-36.55	0.16
39	Plastics and articles thereof.	6288	55198	0	0	750259	505327	396272	-21.58	0.79
40	Rubber and articles thereof.	119583	83629	0	0	5721036	3166159	3578842	13.03	6.06
41	Raw hides and skins (other than furskins) and leather	14289	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
42	Articles of leather, animal gut, harness, travel goods	3645	81	0	0	1653	1409	1797	27.54	0.00
44	Wood and articles of wood; wood charcoal.	49697	9011	0	1916	733779	464427	500612	7.79	0.78

46	Manufactures of plaiting material, basketwork, etc.	399	9764	0	0	53061	44338	3558	-91.98	0.06
48	Paper & paperboard, articles of pulp, paper and board	100068	0	0	0	878086	660242	20819	-96.85	0.93
49	Printed books, newspapers, pictures & other products	0	0	0	0	93270	65294	70	-99.89	0.10
52	Cotton.	0	45810	0	41584	11808	0	7417	0.00	0.01
54	Man-made filaments.	109210	0	0	0	667797	342860	474762	38.47	0.71
55	Man-made staple fibres.	21592	76674	0	0	13888876	7916595	11786792	48.89	14.72
58	Special woven or tufted fabric, lace, tapestry etc	750	0	0	0	11030	11030	2142	-80.58	0.01
61	Art of apparel & clothing access, knitted or croc	0	0	0	0	548464	207858	344506	65.74	0.58
62	Articles of apparel, accessories, not knit or crochet	2804	2871	0	0	421741	240461	413395	71.92	0.45
63	Other made textile articles, sets, worn clothing etc	0	1412	0	0	250085	158637	433721	173.40	0.26
64	Footwear, gaiters and the like; parts of such art	146154	18973	0	0	3147989	1901000	1762259	-7.30	3.34
65	Headgear and parts thereof.	0	0	0	0	5561	5468	1402	-74.36	0.01
67	Bird skin, feathers, artificial flowers, human hair	0	4090	0	0	9370	9370	0	-100.00	0.01
68	Stone, plaster, cement, asbestos, mica, etc articles	20	0	0	0	73845	34477	116694	238.47	0.08
69	Ceramic products.	15139	4862	0	25941	720497	397315	546925	37.66	0.76
70	Glass and glassware.	47510	44818	0	260	360881	183669	350909	91.06	0.38
71	Natural/cultured pearls, prec stones & metals, co	84	0	0	0	1164	1164	2565	120.36	0.00
72	Iron and steel.	0	0	0	0	122389	0	0	0.00	0.13
73	Articles of iron or steel.	0	72	0	0	20415	18757	90275	381.29	0.02
74	Copper and articles thereof.	0	0	0	0	1000	0	0	0.00	0.00
82	Tool, implement, cutlery, spoon & fork, of base m	0	823	0	0	15439	15437	0	-100.00	0.02
83	Miscellaneous articles of base metal.	140	0	0	0	161681	84053	440	-99.48	0.17
84	Nuclear reactors, boilers, mchy & mech appliance;	195	756	0	0	1505444	166850	820403	391.70	1.60
85	Electrical mchy equip parts thereof; sound record	1712456	206663	0	0	32694521	19564932	6586377	-66.34	34.64
87	Vehicles o/t railw/tramw roll-stock, pts & access	42420	43006	0	0	467341	288891	492585	70.51	0.50
88	Aircraft, spacecraft, and parts thereof.	0	0	0	0	1000	1000	0	-100.00	0.00
90	Optical, photo, cine, meas, checking, precision,	0	0	0	0	26135	625	26190	4090.40	0.03
92	Musical instruments; parts and access of such art	10030	0	0	0	207882	96257	197714	105.40	0.22
94	Furniture, lighting, signs, prefabricated buildings	175311	239349	0	54432	3734442	2384173	1895958	-19.80	3.96
95	Toys, games & sports requisites; parts & access t	0	0	0	0	200653	163329	113489	-30.52	0.21
96	Miscellaneous manufactured articles.	0	0	0	0	85486	34236	10333	-69.82	0.09
97	Works of art, collectors' pieces and antiques.	0	853	0	0	2432	1393	1166	-16.30	0.00

Keterangan: Data didapat berdasarkan CoO *(Certificate of Origin)* di daerah kepabeanan Indonesia (Bea Cukai) yang disampaikan ke BPS dan diolah lebih lanjut oleh Pusat Data Kemendag.

Tabel 2.3 Impor Indonesia dari Israel

HS	Nama Produk	Impor Indonesia dari Israel					Jan-Jul 2008	Jan-Jul 2009	Perubahan (%)	Share (%) 08
		2004	2005	2006	2007	2008				
	Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**22123235**	**12021465**	**6921005**	**-42.43**	**100.00**
08	Edible fruit and nuts; peel of citrus fruit or me	0	0	0	0	4998	4570	1235	-72.98	0.02
13	Lac, gums, resins, vegetable saps and extracts nes	0	0	0	0	0	0	38000	0.00	0.00
20	Prep of vegetable, fruit, nuts or other parts of	0	0	0	0	0	0	9090	0.00	0.00
25	Salt, sulphur, earth, stone, plaster, lime and cement	0	0	0	0	30250	27	13932	51500.00	0.14
28	Inorganic chemicals, precious metal compound, isotopes	0	0	0	0	3529	2377	3020	27.05	0.02
29	Organic chemicals.	0	0	0	0	1551395	657791	620481	-5.67	7.01
30	Pharmaceutical products.	0	0	0	0	1516833	661098	777857	17.66	6.86
32	Tanning, dyeing extracts, tannins, derivs,pigments etc	0	0	0	0	56872	28989	298839	930.87	0.26
33	Essential oils & resinoids; perf, cosmetic/toilet	0	0	0	0	260495	191314	158730	-17.03	1.18
34	Soaps, lubricants, waxes, candles, modelling pastes	0	0	0	0	340	0	340	0.00	0.00
38	Miscellaneous chemical products.	0	0	0	0	758443	536578	193038	-64.02	3.43
39	Plastics and articles thereof.	0	0	0	0	185517	58176	1202	-97.93	0.84
42	Articles of leather, animal gut, harness, travel goods	0	0	0	0	459	459	0	-100.00	0.00
48	Paper & paperboard, articles of pulp, paper and board	0	0	0	0	3763	3116	150	-95.19	0.02
49	Printed books, newspapers, pictures & other produ	0	0	0	0	53	28	0	-100.00	0.00
54	Man-made filaments.	0	0	0	0	1757	1757	0	-100.00	0.01
55	Man-made staple fibres.	0	0	0	0	62547	62547	0	-100.00	0.28
61	Art of apparel & clothing access, knitted or croc	0	0	0	0	2529	1712	42010	2353.86	0.01
62	Articles of apparel, accessories, not knit or crochet	0	0	0	0	8377	0	9565	0.00	0.04
68	Stone, plaster, cement, asbestos, mica, etc articles	0	0	0	0	57948	57948	0	-100.00	0.26
69	Ceramic products.	0	0	0	0	75	75	0	-100.00	0.00
70	Glass and glassware.	0	0	0	0	1870	1857	0	-100.00	0.01
72	Iron and steel.	0	0	0	0	14	14	0	-100.00	0.00
73	Articles of iron or steel.	0	0	0	0	55631	24413	6273	-74.30	0.25
82	Tool, implement, cutlery, spoon & fork, of base m	0	0	0	0	509047	329130	57831	-82.43	2.30
83	Miscellaneous articles of base metal.	0	0	0	0	1431	1431	1053	-26.42	0.01
84	Nuclear reactors, boilers, mchy & mech appliance;	0	0	0	0	2415718	959461	1821632	89.86	10.92
85	Electrical mchy equip parts thereof; sound record	0	0	0	0	14266670	8263914	2818085	-65.90	64.49
87	Vehicles o/t railw/tramw roll-stock, pts & access	0	0	0	0	40	40	2026	4965.00	0.00
90	Optical, photo, cine, meas, checking, precision,	0	0	0	0	362139	170189	34500	-79.73	1.64
93	Arms and ammunition, parts and accessories thereof	0	0	0	0	0	0	11576	0.00	0.00
95	Toys, games & sports requisites; parts & access t	0	0	0	0	4262	2291	531	-76.82	0.02
96	Miscellaneous manufactured articles.	0	0	0	0	233	163	9	-94.48	0.00
						44246470				

Keterangan: Data didapat berdasarkan CoO *(Certificate of Origin)* di daerah kepabeanan Indonesia (Bea Cukai) yang disampaikan ke BPS dan diolah lebih lanjut oleh Pusat Data Kemendag.

3 / Hubungan Dagang dengan Israel dalam Implementasi Politik Luar Negeri Bebas-Aktif

BAB KETIGA INI AKAN MENGANALISA HUBUNGAN DAGANG Indonesia-Israel dalam konteks implementasi politik luar negeri bebas aktif Indonesia yang telah dijelaskan pada Pendahuluan. Pertama-tama akan dianalisa kepentingan masing-masing pihak dalam hubungan dagang ini: apa keuntungan dan kerugian Indonesia jika menjalin hubungan dagang dengan Israel? Dan sebaliknya, apa keuntungan dan kerugian Israel dari hubungan dagang ini? Kemudian, untuk menjawab pokok permasalahan, akan dianalisa bagaimanakah hubungan dagang ini harus disikapi dalam kerangka implementasi politik luar negeri bebas aktif Indonesia.

Yang menarik, kasus hubungan dagang Indonesia-Israel yang berlangsung tanpa terjalinnya hubungan diplomatik antar kedua negara ini sebenarnya bisa kita bandingkan dengan kasus hubungan Indonesia-Cina semasa Orde Baru. Pembekuan hubungan diplomatik oleh pemerintah Indonesia pada 1967 praktis membekukan semua hubungan langsung Indonesia-Cina di segala bidang (politik-diplomatik, perdagangan, investasi, kebudayaan dll). Meski demikian, di tengah pembekuan hubungan diplomatik ini, para eksportir-importir dari Cina dan Indonesia masih bisa terus bertransaksi. Perdagangan ini dilakukan

secara tidak langsung melalui perantaraan negara-negara ketiga, yaitu Hong Kong, Singapura, dan Jepang.

Kemudian, hubungan dagang Indonesia-Israel yang dilegalkan semasa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid melalui Kepmen No.23/MPP/01/2001 (masih berlaku hingga saat ini),[2] bisa kita bandingkan dengan pelegalan hubungan dagang Indonesia-Cina pada 23 Juli 1985 melalui Instruksi Presiden (Inpres) RI Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Hubungan Dagang Langsung Indonesia-Cina, yang dikeluarkan oleh Presiden Soeharto.[3] Kepada sembilan pejabat yaitu Menteri Luar Negeri, Kehakiman, Perdagangan, Perhubungan, Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi, Menteri Muda Sekretaris Kabinet, Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), Gubernur Bank Indonesia dan Kepala Badan Koordinasi Inteligen Negara (BAKIN) diinstruksikan agar melaksanakan kebijakan dan mengambil langkah-langkah guna membantu kelancaran hubungan dagang langsung Indonesia-Cina. Saat itu pun hubungan diplomatik antar kedua negara belum dipulihkan. Normalisasi hubungan baru terjadi pada 1990.

Selanjutnya, pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terindikasi adanya penguatan hubungan dagang melalui kunjungan Kadin ke Tel Aviv dan pembentukan Kamar Dagang Israel-Indonesia yang berpusat di Tel Aviv pada 2009. Lagi-lagi ini bisa kita bandingkan dengan situasi menjelang pertemuan Presiden Soeharto dengan Menteri Luar Negeri RRC Qian Qichen di Tokyo pada Maret 1989 sebagai

1. Lihat Sukamdani S. Gitosardjono, *Dinamika Hubunan Indonesia – Tiongkok di Era Kebangkitan Asia* (Jakarta: Putra Perkasa Cahaya Bunda, 2006), hlm. 24-25.
2. Masih berlakunya Kepmen Perdagangan No.23/MPP/01/2001 diakui oleh Kepala Seksi Barang Tambang dan Limah Direktorat Impor Kementerian Perdagangan saat ditanya oleh penulis pada Rabu, 23 Desember 2009.
3. Gitosardjono, *op. cit.*, hlm. 37.

langkah awal normalisasi hubungan. Dalam Kesepakatan Tokyo, tampak adanya kaitan jelas antara prospek normalisasi dengan hubungan dagang langsung antar kedua negara.[4]

Dari kasus Indonesia-Cina kita bisa belajar bahwa hubungan dagang memang sepertinya ada di luar jangkauan hubungan diplomatik, bahkan bisa menjadi semacam pelopor untuk menjalin kembali hubungan diplomatik. Apakah hal yang serupa akan atau mungkin terjadi dalam kasus Indonesia-Israel?

KEPENTINGAN ISRAEL DALAM HUBUNGAN DAGANG DENGAN INDONESIA

Kepentingan Israel dalam hubungan dagang dengan Indonesia tidak terlepas dari ambisinya untuk jadi berpengaruh di Asia. Golda Meir, mantan Menlu dan PM Israel yang terkenal dengan julukan "Wanita Besi Israel," pernah mengatakan, "Seharusnya kami di sini merupakan bagian tak terpisahkan dari bangsa Asia."[5] Dalam pernyataan tersebut tersirat obsesi geopolitik Israel yang kemudian dijadikan kebijakan dalam politik luar negerinya.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Israel telah menjalin kerjasama dengan Jepang (1995), Korea Selatan (1997), India, Cina, Filipina,[6] Malaysia, dan Indonesia.[7] Dari kerjasama ini Israel mendapatkan keuntungan ekonomi, sementara tekanan politik tidak banyak diterimanya karena negara-negara Asia umumnya tidak agresif dalam menuntut penyelesaian konflik Arab-Israel secara tuntas, meskipun negara-negara ini juga bukan sama sekali tidak peduli pada penyelesaian masalah

4. "Manfaat di bidang ekonomi telah lebih dulu dirintis dengan adanya lalu lintas dagang yang di pihak Indonesia diwakili oleh Kadin." Lihat *Kompas,* 25 Februari 1989, juga Gitosardjono, *ibid.*, hlm. 47-48.
5. Musthafa Abd. Rahman, *op. cit.*, hlm. 144.
6. *Ibid.*
7. Nilai ekspor untuk Malaysia dan Indonesia pada 2002 sebesar AS$280 juta (Herry Nurdi, *op. cit.*, hlm. 370).

Palestina. Pada pelbagai forum internasional maupun regional, negara-negara Asia tetap membawa resolusi PBB No. 242 dan 338 sebagai solusi perdamaian di Timur Tengah, yakni mundurnya Israel dari seluruh wilayah yang didudukinya pada perang 1967.[8]

Israel menerapkan kebijakan kerjasama dengan negara-negara Asia ini secara bertahap, mulai dari kerjasama ekonomi dan perdagangan, berlanjut ke kerjasama iptek, dan sekiranya mungkin ditingkatkan ke kerjasama politik dan keamanan, hingga berujung ke pembukaan hubungan diplomatik secara resmi dan total.

Ada beberapa faktor yang membuat Israel bersikeras menjalin kerjasama dengan negara-negara Asia, dan faktor-faktor ini sekaligus merupakan kelemahan dalam negeri Israel, antara lain:

1. Secara geografis, pertahanan Israel sangat rentan.
   Faktor ini bisa kita cermati dari: (1) luas wilayahnya yang hanya 20.770 km² dan berada pada dataran rendah; (2) berbatasan dengan negara-negara besar yang sebagian negara-negara Arab yang bermusuhan dengan Israel; dan (3) topografi Israel adalah pesisir Laut Tengah, sementara negara-negara besar di sekelilingnya berwilayah perbukitan. Posisi pesisir ini memudahkannya menjadi target serangan dan sebaliknya menyulitkannya untuk membangun pertahanan yang tangguh.
2. Secara demografis, Israel juga lemah.
   Israel dengan penduduk sebanyak 7,7 juta jiwa berada di tengah negara-negara yang pernah atau sedang bermusuhan dengannya, yang total jumlah penduduknya hampir 400 juta jiwa. Angka pertumbuhan penduduk juga lambat dan Israel harus memilah-milah warganya dalam fungsi

8. Musthafa Abd. Rahman, *op. cit.*, hlm. 146-147.

pertahanan dan fungsi pembangunan.

3. Secara ekonomi, potensi alam Israel terbilang miskin. Sebagian besar wilayah Israel adalah padang pasir tandus atau pantai berpasir, tanpa kekayaan alam yang signifikan, dan bahkan mengalami krisis sumber mata air.
4. Secara geokultural dan politik, eksistensi komunitas Yahudi masih dipandang oleh bangsa Arab sebagai "orang lain."

Dari semua faktor tersebut, menurut penulis, faktor ketigalah yang paling mengharuskan Israel untuk menjalin kerjasama ekonomi, perdagangan, dan investasi dengan negara-negara Asia. Langkah dan pelaksanaan politik luar negeri Israel selaras dengan rencana strategisnya untuk mencapai kepentingan ekonomi nasionalnya.

Untuk itulah Israel bersikeras mendekati Indonesia sebagai salah satu negara Asia yang selain berpenduduk Muslim terbesar, juga memiliki kekayaan alam berlimpah dengan potensi ekonomi yang relatif stabil. Upaya sulit selama bertahun-tahun untuk menjalin hubungan kerjasama saling menguntungkan itu terbuka sekatnya saat pemerintah Indonesia mengeluarkan Kepmen No.23/MPP/01/2001 tertanggal 10 Januari 2001 yang menghapus hambatan dalam hubungan dagang Israel-Indonesia.

Beberapa faktor yang membuat Israel sangat ingin bekerjasama dengan Indonesia antara lain:

1. Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki arti penting dan strategis bagi politik luar negeri Israel di dunia Islam. Israel memandang Indonesia sebagai pintu masuk ke dunia Islam. Terjalinnya hubungan diplomatik Indonesia-Israel diharapkan dapat mengurangi ketegangan dengan negara-negara dunia Islam.
2. Terutama dalam konteks Perang Dingin, berarti pada masa

Orde Baru, posisi Indonesia sebagai ketua Gerakan Non Blok diharapkan berpengaruh juga pada negara-negara Dunia Ketiga umumnya.

3. Indonesia juga dianggap sebagai pasar potensial bagi produk-produk Israel.[9]
4. Pengaruh Indonesia di ASEAN dapat membuka peluang bagi Israel untuk memasuki negara-negara kawasan tersebut sebagai mitra kerjasama yang permanen, seperti halnya kerjasama Cina-ASEAN, terutama di bidang ekonomi, politik, dan pertahanan.

Dalam mengupayakan terbukanya hubungan diplomatik ini, Israel tidak hanya menggunakan pendekatan langsung, namun memanfaatkan juga "jalur AS" di aras global dengan harapan AS dapat melobi dan menekan Indonesia agar membuka kerjasama dengan Israel. Selain itu, Israel juga memanfaatkan "jalur Singapura" untuk tingkat ASEAN. Bisa dibilang Singapura adalah satu-satunya negara ASEAN yang antusias dan berkepentingan dengan dibukanya hubungan diplomatik Israel-Indonesia.

Dengan demikian, dari faktor-faktor di atas, penulis menyimpulkan kita bisa melihat kepentingan Israel dalam konteks hubungan dagang Indonesia-Israel ini dalam skala prioritas sebagai berikut:

1. Kepentingan ekonomi tetap menjadi faktor penentu. Israel membutuhkan bahan-bahan mentah dari Indonesia untuk kebutuhan domestiknya. Dan melalui perdagangan dengan volume yang cukup signifikan, didapat devisa untuk pembangunan ekonomi Israel. Selain itu, Israel juga membutuhkan Indonesia untuk menjual produk-produk teknologinya, terutama produk-produk militer untuk kepenting-

9. Riza Sihbudi, "Perkembangan Timur Tengah dan Masalah Hubungan Indonesia-Israel," *op. cit.*

an pertahanan. Dengan ini terbuka akses bagi para investor Israel untuk menanamkan modalnya di Indonesia dalam skala besar.

2. Israel dapat memanfaatkan Indonesia sebagai penengah konfliknya dengan Palestina dan peredam ketegangan dengan negara-negara Arab.
3. Melalui hubungan dagang dengan Indonesia, Israel bisa mendapat akses dan peluang di bidang ekonomi untuk ASEAN dan ASEAN+3 serta di bidang politik dan keamanan untuk ASEAN Regional Forum. Isreal berkepentingan untuk setidaknya bisa menjadi mitra negara-negara ASEAN dan memberikan pengaruhnya di organisasi regional tersebut.
4. Hubungan dagang hanyalah langkah awal menuju pembukaan hubungan diplomatik dengan Indonesia.

Dalam wawancara dengan penulis, Emanuel Shahaf, pimpinan Technology Asia Consulting yang juga Ketua Kamar Dagang Israel-Indonesia,[10] mengatakan sebagai berikut mengenai hubungan dengan Indonesia:

> Hubungan politik dengan Indonesia itu penting karena Israel perlu membangun relasi dengan dunia Muslim dan khususnya, negara-negara Muslim yang moderat. Dengan begitu, penduduk Israel bisa memahami bahwa Muslim tidak semuanya radikal ataupun ekstrem seperti sebagian tetangga kami (Hamas, Hizbullah). Sayangnya, Israel nyaris tidak berbuat apapun untuk menggarap hubungan tersebut. Saya tidak yakin bahwa Indonesia akan tertarik, karena apapun yang ada kaitannya dengan Israel akan menjadi barang panas di Indonesia karena politisi takut disangkut-pautkan dengannya gara-gara FPI atau PKS atau MUI dan semacamnya itu—saya rindu Gus Dur, ia tidak takut apapun.

10. Wawancara tertulis dengan Emanuel Shahaf pada Minggu, 12 Desember 2010. Lebih lengkap lihat Lampiran 3.

> Hubungan ekonomi juga penting karena Indonesia adalah pasar potensial yang besar terutama untuk ilmu pengetahuan dan teknologi Israel. Ada kecocokan dari dua perekonomian ini—kami punya pengetahuan, teknologi, dan kewirausahaan, sementara Indonesia memiliki sumber daya dan kebutuhan besar pembangunan infrastruktur dalam hampir segala bidang yang dihasilkan dengan baik oleh Israel (pertanian, obat-obatan, teknologi informasi komunikasi).

Ketika ditanya apa keuntungan ekonomi Indonesia dari kerjasama dengan Israel, Shahaf menegaskan:

> Israel sangat inovatif, kami mengambil inisiatif dan kami terdepan di bidang teknologi yang dibutuhkan Indonesia dalam banyak hal. Ini ada satu hal yang akan mengagetkan Anda: 75% properti intelektual Intel ("Intel Inside") berasal dari Israel [...] Kamilah lokomotif teknologi.[10]

Pernyataan Shahaf menunjukkan dengan jelas bahwa Indonesia memang menjadi sasaran Israel untuk membangun kerjasama ekonomi. Hal ini bisa dikerangkai seturut pandangan Rosenau tentang politik luar negeri sebagai serangkaian sikap dan aktivitas sebuah negara untuk mengambil keuntungan dari lingkungan internasional agar dapat memenuhi berbagai kebutuhan domestiknya dan mempertahankan kelangsungan hidupnya.[11]

Dalam kerangka tersebut, langkah dan tindakan Israel untuk mengupayakan terjalinnya kerjasama dengan Indonesia merupakan hal yang sewajar-wajarnya, karena negara manapun di dunia juga akan melakukan hal yang sama, yaitu menjalin kerjasama ekonomi dengan negara-negara lain untuk pembangunan ekonomi domestiknya.

11. *Ibid.*
12. James N. Rosenau, "Foreign Policy as Adaptive Behavior," *Comparative Politics* Vol. 2, April 1970, hlm. 366.

Inilah kepentingan Israel atas Indonesia. Sampai saat ini, kepentingan tersebut baru bisa direalisasikan sebatas dalam tataran hubungan dagang karena Indonesia tetap berkomitmen untuk tidak menjalin hubungan diplomatik dengan Israel.

KEPENTINGAN INDONESIA DALAM HUBUNGAN DAGANG DENGAN ISRAEL

Perlu diingat bahwa bukan Israel saja yang aktif mengupayakan hubungan dengan Indonesia, tetapi demikian pula halnya sebagian pihak dari Indonesia. Dengan pertimbangan pemulihan perekonomian Indonesia pasca krisis, Menlu Alwi Shihab pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid proaktif mengupayakan pertemuan dengan tokoh-tokoh Israel untuk menjajaki peluang hubungan dagang antar kedua negara.

Demikian pula pada pemerintahan Presiden SBY. Misi dagang Kadin yang dipimpin M.S. Hidayat ke Tel Aviv pada 2006 membuahkan perjanjian ekonomi kedua negara.[13] Kerjasama ini berlanjut dengan dibukanya Kamar Dagang Israel-Indonesia di Tel Aviv pada 2009. Volume perdagangan kedua negara pun semakin meningkat sebagai akibatnya. Seperti bisa dilihat dari perbandingan Tabel 2.2 dan 2.3 (hlm. 60-62), ekspor Indonesia ke Israel jauh melebihi impor Indonesia dari Israel. Dari kenyataan tersebut, setidaknya, Indonesia bisa dibilang juga memiliki kepentingan dari hubungan dagang ini. Pertanyaannya kemudian, benarkah hubungan dagang ini akan menguntungkan Indonesia?

M.S. Hidayat, selaku Ketua Kadin saat itu, optimistis bahwa Indonesia akan diuntungkan dari hubungan dagang ini. Pendapat senada dikemukakan oleh Raden Sulistya Widayanta mewakili Kementerian Perdagangan dalam wawancara dengan penulis:

13. Faisal M. Sakrie, *op. cit.*, hlm. 122.

> Perdagangan dengan Israel berpotensi besar memberikan keuntungan bagi Indonesia, terutama dari segi investasi dan inovasi. Saat ini, Israel menanamkan investasi, berproduksi, dan menerapkan inovasi teknologi barunya ke India dan Cina.[14]

Secara umum, pandangan yang menganggap hubungan dagang ini akan menguntungkan untuk Indonesia didasari oleh argumentasi sebagai berikut:

1. Israel tidak memiliki cukup sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan domestiknya. Indonesia dapat memanfaatkan kondisi ini dengan menjual produk-produk bahan mentah dan hasil olahan.
2. Indonesia dapat memanfaatkan transfer teknologi mutakhir Israel untuk meningkatkan kualitas masyarakat dan pertahanan Indonesia.
3. Melalui hubungan dagang dengan Israel, Indonesia dapat memaksimalkan perjuangan kemerdekaan otoritas Palestina melalui pendekatan diplomasi preventif dengan Israel dan menghimpun dukungan negara-negara Barat untuk kemerdekaan Palestina.
4. Diharapkan lobi Indonesia terhadap tekanan kepentingan negara-negara Barat, khususnya AS, jadi kian kuat, mengingat posisi Israel sebagai "anak emas" AS. Dan dalam hal ini, Indonesia dapat lebih meningkatkan posisi tawarnya di mata negara-negara Barat.
5. Penanaman modal oleh investor-investor Israel di Indonesia berguna untuk mendorong perekonomian.

Namun banyak pihak bersikap lebih hati-hati dalam menyikapi prospek hubungan dagang ini. Dalam wawancara de-

14. Wawancara tertulis dengan Raden Sulistya Widayanta, Kepala Subdirektorat Fasilitasi dan Aturan Perdagangan Direktorat Kerjasama Multilateral, pada 20 Desember 2010.

ngan harian ekonomi *Neraca,* Ernovian G. Ismi, Sekretaris Jenderal Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), menyatakan bahwa pemerintah patut memperhitungkan untung rugi ketika memutuskan untuk menjalin kerjasama bilateral di bidang perdagangan dengan semua negara:

> Jika kita menjalin hubungan perdagangan dengan Israel, perlu ditinjau kembali apa yang ingin diperdagangkan. Kita lihat apa kebutuhan mereka yang bisa diproduksi di dalam negeri supaya Indonesia tidak merugi.[15]

Syamsul Hadi, pakar ekonomi internasional dari Universitas Indonesia, malah dengan tegas menyatakan bahwa hubungan dagang Indonesia-Israel tidak memberi kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional. Karena ditinjau dari ceruk pasar, Israel tidak akan memberikan manfaat besar bagi pertumbuhan devisa nasional Indonesia:

> Saya kira hubungan dagang RI-Israel hanya memberi manfaat kompetensi positif bagi industri negara itu. Sebaliknya, urgensi secara ekonomis dari kerjasama itu belum terlihat gamblang.[16]

Hal yang sama dinyatakan Suroso Imam Zadjuli, pakar ekonomi dari Universitas Airlangga, yang menilai hubungan dagang Indonesia-Israel akan merugikan Indonesia dua kali, yakni secara ekonomi dan politik:

> Kalau diharuskan memilih hubungan diplomatik dengan hubungan dagang dengan Israel, saya lebih memilih hubungan diplomatik saja, karena hubungan diplomatik hanya berdampak politik tapi hubungan dagang akan berdampak politik dan ekonomi. Hubungan dagang Indonesia-Israel akan me-

15. "Untung Rugi Hubungan Dagang Indonesia-Israel", harian ekonomi *Neraca,* 20 Januari 2010.
16. *Ibid.*

> nyebabkan Indonesia mengalami kerugian dua kali yaitu kerugian ekonomi dan kerugian politik … Jika Israel "mengambil" industri dasar seperti listrik, semen, penerbangan, Israel akan menjajah ekonomi Indonesia. Sedangkan Indonesia tidak mendapatkan nilai ekonomis apa pun dari Israel.[17]

Kehati-hatian bahkan kekhawatiran yang sama juga ditunjukkan oleh sebagian kalangan ketika Telkomsel menunjuk Amdocs untuk menangani sistem operasi penagihan atau Billing Software System (BSS) dengan nilai proyek senilai Rp 1,2 triliun pada akhir Februari 2011 dan proyek Customer Relationship Management (CRM) senilai Rp 1,8 triliun pada Mei 2011. Awalnya Telkomsel menyebut Amdocs Inc. sebagai perusahaan AS yang berdomisili di Missouri, AS. Namun belakangan, dalam rapat dengar pendapat di DPR pada 23 Juni 2011, terkuaklah bahwa Amdocs Inc. hanyalah anak perusahaan operasional yang sahamnya 100% dimiliki Amdocs Ltd. yang bermarkas di Ra'na, Israel.[18] Dikhawatirkan data-data pelanggan di Indonesia bisa disalahgunakan untuk kepentingan intelijen Israel seperti penyadapan. Namun demikian, kekhawatiran ini ditepis oleh Direktur Utama Telkomsel Sarwoto Atmosutarno yang menjamin kerjasama ini aman.

HUBUNGAN DAGANG INDONESIA-ISRAEL DALAM IMPLEMENTASI POLITIK LUAR NEGERI BEBAS AKTIF

Secara politik, pemerintah Indonesia secara tegas menyatakan tidak akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel, setidak-tidaknya sampai Palestina bisa merdeka dan berdaulat penuh di wilayahnya sendiri. Ketetapan ini pernah ditegaskan

17. Dikutip dari Rizki Ridyasmara, *op. cit.*, hlm. 88-89.
18. "Akhirnya Dirut Telkomsel Akui Amdocs Milik Israel," www.muslimdaily.net, 30 Juni 2011.

oleh Menlu Hassan Wirajuda.

Jadi, bagaimanakah sikap pemerintah ini harus dimaknai, melihat pemerintah sendiri membuka kemungkinan terjalinnya hubungan dagang dengan Israel? Apakah ini sebuah ambiguitas atau sikap plin-plan terhadap Israel?

Penulis cenderung melihat langkah pemerintah ini sebagai bagian dari dinamika ekonomi-politik riil yang harus dihadapi pasca krisis 1997/1998. Salah satu langkah pemulihan yang ditempuh semasa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid adalah dengan mencanangkan "diplomasi ekonomi" untuk menarik investor asing ke Indonesia. Dalam pidatonya di depan MPR pada 7 Agustus 2000, Gus Dur menyatakan:

> Upaya pemulihan ekonomi nasional terus kita lakukan dengan mengundang masuknya investasi dari luar negeri ke Indonesia. Sesungguhnya, minat para investor asing untuk menanam modalnya di Indonesia yang memiliki sumber daya alam yang besar amat tinggi. Tetapi ini hanya dapat dicapai kalau kita sukses memperbaiki citra Indonesia, sehingga kepercayaan internasional terhadap Indonesia pulih kembali.[19]

Diplomasi ekonomi internasional di sini dimaknai sebagai segala upaya untuk menjalin, meningkatkan dan memanfaatkan hubungan atau kerjasama –bila perlu dengan kekuatan politik—untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi. Dari pernyataan Gus Dur di atas maupun yang telah sebelumnya dikutip dalam buku ini, kita bisa melihat bahwa inisiatif Gus Dur untuk menjalin hubungan dagang dengan Israel bukan karena kedekatannya dengan Israel atau Yahudi sebagaimana banyak dituduhkan selama ini, namun didorong oleh kepentingan na-

19. Dikutip dari Moenir Ari Soenanda, "Kepentingan Nasional Indonesia di Dunia Internasional," Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika (P3K2 Aspasaf), diakses dari http://ditpolkom.bappenas.go.id/?page=news&id=31.

sional penyelamatan ekonomi dalam negeri Indonesia.

Menjalin hubungan dagang dengan Israel adalah salah satu alternatif pilihan untuk memperluas kerjasama ekonomi Indonesia dengan dunia luar. Yang perlu ditekankan di sini: membuka hubungan dagang bukan berarti Indonesia akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Pemerintah Indonesia selalu berkomitmen untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Selama Palestina belum merdeka, maka Indonesia tidak akan mengakui Israel dan tidak akan menjalin hubungan diplomatik. Sebaliknya, Indonesia justru telah menjalin hubungan diplomatik dengan Palestina, sebagaimana dikemukakan oleh Nanda Avalis, Kepala Seksi Lebanon dan Palestina Direktorat Timur Tengah Kementerian Luar Negeri, sebagai berikut:

> Indonesia memiliki hubungan diplomatik dengan Palestina hingga tingkat hubungan diplomatik penuh, dengan masing-masing memiliki duta besar. Namun, jika Palestina memiliki duta besar ditempatkan di Jakarta, Indonesia belum menempatkan duta besarnya baik di Ramallah maupun di Yerusalem, karena Indonesia tidak memiliki hubungan dengan kekuatan yang menduduki wilayah tersebut. Perlu diingat bahwa pengiriman duta besar memerlukan *approval* dari *power* yang menguasai wilayah tersebut. Kedutaan Palestina di Jakarta berada di Jl. Teuku Umar dan dibuka sejak 1988. Awalnya, pada tahun 1984 berdiri biro Palestina di Jakarta (setelah kunjungan Yasser Arafat ke Indonesia), kemudian pada 1988 Palestina memproklamirkan kemerdekaannya dan Indonesia mengakuinya sebagai negara.[20]

Prinsip politik luar negeri bebas aktif sebagaimana dijelaskan dalam UU No.37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri pada hakikatnya bukan politik netral, melainkan politik

20. Wawanacara dengan Nanda Avalis, Kepala Seksi Lebanon dan Palestina Direktorat Timur Tengah Kementerian Luar Negeri, pada Kamis, 23 Desember 2010.

luar negeri yang bebas dalam menentukan sikap, perilaku, atau kebijakannya terhadap permasalahan internasional. Prinsip bebas aktif tidak dibenarkan mengikatkan diri pada suatu kekuatan dunia dan aktif memberi sumbangan baik dalam bentuk pemikiran maupun partisipasi aktif dalam menyelesaikan konflik, sengketa permasalahan dunia, demi terwujudnya ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.[21]

Oleh karena itu, dengan menimbang pelbagai faktor yang telah diuraikan di atas, penulis menilai bahwa sikap, perilaku, dan kebijakan pemerintah Indonesia menyangkut hubungan dagang dengan Israel tetap sejalan dengan pedoman dalam UU No. 37 tahun 1999 tersebut. Pemerintah Indonesia diharapkan dapat memaksimalkan posisi tersebut untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina dan memperjuangkan kemerdekaan negara Palestina.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga menegaskan bahwa Indonesia akan menggunakan pendekatan konstruktif dalam implementasi politik luar negeri bebas aktif. Pendekatan tersebut menerapkan sikap dan pola pikir yang tidak didasarkan pada kecurigaan berlebihan, sikap ketakutan atau defensif, melainkan sikap percaya diri dan semangat kemitraan dalam hubungan yang saling menguntungkan dengan negara-negara lain.[22] Dan Indonesia juga berupaya menjangkau semua negara secara seimbang dalam melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif.

Terkait dengan hubungan dagang Indonesia-Israel, pendekatan konstruktif Presiden SBY menjadi acuan utama dalam menjalin hubungan atau kerjasama. Indonesia menempatkan diri dalam posisi percaya diri dan tidak curiga berlebihan ter-

21. UU No. 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, pasal 3.
22. Departemen Luar Negeri Indonesia, *Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia,* Jakarta, Deplu, 8 Januari 2007, hlm. 7.

hadap Israel yang ingin menjalin hubungan dagang dengan Indonesia. Indonesia juga berupaya keras mengikat Israel dalam hubungan dagang yang saling menguntungkan dan dengan semangat kemitraan yang berkesinambungan.

Presiden SBY menyatakan bahwa dalam konteks pasca Perang Dingin, politik luar negeri bebas aktif sudah tidak cukup lagi. Politik luar negeri harus diarahkan agar kita mempunyai "sejuta kawan tanpa musuh," sebagaimana yang dikemukakannya sebagai berikut:

> Kita menyadari, di abad ke-21, politik bebas aktif saja sudah tidak cukup. Kita harus menjalankan diplomasi bebas, aktif, dan transformatif... Inilah saatnya prestasi, produk, budaya dan ide-ide Indonesia semakin menjadi bagian dari dinamika di tingkat global.[23]

"Transformatif" menjadi kata kunci di sini. Dalam konteks konflik Israel-Palestina, Indonesia telah berupaya menghadirkan transformasi positif dalam perdamaian Timur Tengah.

Oleh karena itu, menurut penulis, dalam konteks strategi dan kebijakan ekonomi luar negeri, dilegalkannya perdagangan melalui Kepmen tahun 2001 merupakan strategi yang tepat karena strategi tersebut ditujukan untuk: (1) strategi jangka pendek dan menengah yaitu untuk pemulihan ekonomi nasional dengan cepat pasca krisis ekonomi tahun 1997; dan (2) strategi jangka panjang yaitu pembangunan ekonomi nasional demi kepentingan nasional Indonesia.

Bila pada awal bab ini telah dicontohkan hubungan Indonesia-Cina sebagai perbandingan hubungan dagang Indonesia-Israel, maka kita juga bisa memakai kondisi hubungan dagang Indonesia-Taiwan saat ini sebagai perbandingan lainnya. Peme-

23. Dikutip dari Insaf Albert Tarigan, "SBY: Politik Bebas Aktif Sudah Tak Layak," okezone.com, 16 Agustus 2010.

rintah Indonesia secara jelas dan konsisten memberlakukan kebijakan Satu Cina dalam politik luar negerinya dan dengan demikian tidak memberikan pengakuan terhadap Taiwan dalam bentuk pembukaan hubungan diplomatik. Namun demikian, hubungan dagang dengan Taiwan terus terjalin dengan lancar, bahkan Indonesia memiliki Kantor Dagang dan Ekonomi di Taipei.

Dengan demikian jelas bahwa hubungan dagang harus dibedakan dengan hubungan diplomatik. Bila kasus Taiwan diekstrapolasikan sesuai bahasan buku ini, maka pemerintah Indonesia tidak harus melakukan hubungan langsung dengan Israel, namun hubungan dagang bisa dilakukan melalui Kadin dan para pelaku industri yang memahami akses-akses dan seluk-beluk perdagangan. Hubungan yang dijalin Kadin tidak serta merta mencerminkan sikap politik pemerintah Indonesia. Sebagaimana disampaikan oleh Raden Sulistya Widayanta, perwakilan dari Kementerian Perdagangan, sebagai berikut:

> Kadin Indonesia adalah organisasi yang mewadahi dan beranggotakan asosiasi pengusaha, produsen dan termasuk koperasi. Anggota ini yang melakukan kegiatan perdagangan luar negeri. Kadin itu sendiri adalah perwakilan kelompok kepentingan pengusaha dan produsen... Kadin dan Kementerian Perdagangan selalu bekerjasama untuk setiap isu terkait perdagangan baik kebijakan, kerjasama perdagangan, pembuat kebijakan, perundingan, sengketa dagang, fasilitasi, investasi, regulasi dan sosialisasi isu perdagangan.[24]

Nanda Avalis juga menegaskan bahwa Kemenlu dan Kemdag tidak terkait dengan masalah hubungan dagang Indonesia-Israel:

> Deplu tidak terlibat dalam perdagangan, begitupun Depdag. Perdagangan tersebut antara swasta-swasta, Depdag hanya mengeluarkan peraturan tersebut dan *monitoring* angka

24. Wawancara dengan Raden Sulistya Widayanta, *op. cit.*

> ekspor-impor atau masukan dari bea cukai. Dan itu benar-benar *business to business.* Jadi dengan adanya peraturan tersebut, bea cukai meloloskan pengiriman komoditas ke negara tujuan.[25]

Hal yang sama juga disampaikan oleh Wakil Presiden saat itu, Jusuf Kalla, ketika ditanya soal hubungan dagang dengan Israel yang dijalin oleh Kadin. Ia menyatakan, "Pemerintah tidak ikut campur dalam hal ini. *'Business to business'* saja, tidak punya kepentingan apa-apa."[26]

Menghadapi realitas global kontemporer, politik luar negeri bebas aktif Indonesia dipandang perlu menyeimbangkan antara cita-cita dan kenyataan internal dan eksternal. Pembukaan UUD 1945 memberi amanat agar Indonesia memainkan peran penting dalam menegakkan kemerdekaan dan mewujudkan perdamaian dunia. Namun, kondisi riil bangsa Indonesia juga membutuhkan pembangunan nasional yang berkesinambungan, khususnya pasca krisis 1997 dan 2008 yang sangat memerlukan langkah pemulihan ekonomi yang sungguh-sungguh.

Prinsip bebas aktif merujuk pada konsep peranan mendukung kemerdekaan dan perdamaian dunia, juga pada upaya pembangunan ekonomi nasional. Di satu pihak, Indonesia terus secara konsisten mendukung penyelesaian konflik Israel-Palestina dan memperjuangkan kemerdekaan Palestina secara utuh, di pihak lain, guna mendukung pemulihan ekonomi nasional, Indonesia berhak menjalin hubungan dengan Israel (serta negara manapun) dalam konteks perdagangan dan investasi. Dari uraian di atas, prinsip bebas aktif masih relevan diimplementasikan dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia. Pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif ini harus didukung dengan prinsip "transformatif" agar ide-ide Indonesia

25. Wawanacara dengan Nanda Avalis, *op. cit.*
26. "Kalla: Kadin ke Israel, Pemerintah Tak Ikut Campur," *Republika,* 8 Juli 2006.

lebih didengar di kancah internasional, dan oleh diplomasi ekonomi yang kuat dan proaktif untuk membantu pembangunan ekonomi Indonesia secara maksimal.

Berkait dengan prinsip bebas aktif dalam konteks hubungan dagang Indonesia-Israel ini, Nanda Avalis, Kepala Seksi Lebanon dan Palestina Direktorat Timur Tengah Kementerian Luar Negeri menyatakan:

> Bentuk bebas aktif adalah bilamana perlu bisa saja berdagang tetapi tidak perlu terseret ke dalam pengakuan. Oleh karena itu dinamakan bebas aktif. Jadi kita tidak terseret dalam fleksibelitas ranah politik. Dengan kata lain, *practicality* di bidang lain bisa saja. Artinya, satu penolakan atas pendudukan tidak perlu dibarengi dengan tidak berdagang dengan dia. Seperti contoh dengan Taiwan, selama kita tidak mengakui Taiwan sebagai negara, RRC tidak keberatan. Hal ini didasarkan pada sebuah argumentasi: 'siapa yang menguasai teritori suatu negara dia adalah pemerintah yang sah'. Dalam hal ini, RRC adalah versi yang otentik sedangkan Taiwan sub-versi. Jadi secara keseluruhan, jika perdagangan berada di luar masalah politis itu masih bisa dibenarkan...
>
> Jika Politik dengan P besar yang diartikan sebagai *foreign policy,* politik dan ekonomi terpisah. Makanya, *businessman* kita bisa saja melakukan transaksi terlebih lagi diperkuat dengan Kepmen No.23/MPP/01/2001 yang merupakan penyempurnaan dari Kepmen No.26/MPP/Kep/II/2000. Memang tidak bisa disangkal, pintu ini dimanfaatkan oleh pihak Israel. Berbeda dari sebelumnya yang dilarang berdasarkan Kepmendag RI No.102/SK/VIII/67 tentang ketentuan kebijaksanaan dalam bidang ekspor dan pemasaran barang-barang atau hasil-hasil bumi Indonesia. Yang salah satu poinnya tidak memberikan izin ekspor ke Israel.[27]

Hubungan dagang Indonesia-Israel secara realistis mengindikasikan bahwa tidak ada negara satu pun yang secara kese-

27. Wawanacara dengan Nanda Avalis, *op. cit.*

luruhan dapat memenuhi sendiri kebutuhannya, masing-masing bergantung pada sumberdaya dan produk dari negara lain. Namun, dalam hubungan dagang ini, sekalipun pemerintah Indonesia membuka sekat-sekat perizinan yang mencabut hambatan bagi pihak swasta kedua belah pihak untuk bisa bertransaksi, pemerintah sendiri sampai sekarang tetap menjaga jarak dari kemungkinan pembukaan hubungan diplomatik dengan Israel, setidaknya sampai Palestina merdeka penuh. Kedekatan suatu negara dengan negara lainnya di bidang perekonomian, khususnya perdagangan, tidak menempatkan posisi negara tersebut ke dalam suatu poros yang secara otomatis menimbulkan keberpihakan politik.

Dengan demikian, untuk menjawab pertanyaan buku ini, pilihan kebijakan melegalkan hubungan dagang dengan Israel ditujukan bagi kepentingan nasional Indonesia dan karenanya tidak bertentangan dengan implementasi politik bebas aktif Indonesia. Perdagangan dengan Israel harus murni merupakan perdagangan sebagaimana mestinya dan tidak terdapat keterlibatan pemerintah terhadap perdagangan tersebut, terlebih lagi pembukaan hubungan diplomatik.

Daftar Pustaka

BUKU, JURNAL, MAKALAH

Ahron Bregman, *A History of Israel* (London: Palgrave Macmillan, 2002).

Amir MS, *Seluk Beluk dan Teknik Perdagangan Luar Negeri* (Jakarta: PPM, 2004).

Amy Romano, *A Historical Atlas of Israel* (New York: Rosen Publishing, 2003).

Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005).

Andre H. Pareira (ed.), *Perubahan Global dan Perkembangan Studi Hubungan Internasional* (Bandung: Parahyangan Center for International Studies [PACIS], 1999).

Athiqah Nur Alami, "Landasan dan Prinsip Politik Luar Negeri Indonesia", dalam Ganewati Wuryandari, *Politik Luar Negeri Indonesia: di Tengah Pusaran Politik Domestik* (Jakarta: P2P-LIPI, 2008).

Colin Shindler, *The Land Beyond Promise: Israel, Likud and the Zionist Dream* (London: I.B.Tauris, 2002).

Derek Smith, *Deterring America: Rogue States and the Proliferation of Weapons of Mass Destruction* (Cambridge: Cambridge University Press, 2006).

Djoko Poerwoko, *Menari di Angkasa* (Jakarta: Kata Hasta Pustaka, 2006).

Donald E.Nuechterlien, "The Concept of National Interest: A Time

for New Approaches," *Journal of World Affair,* musim semi 1997

Encyclopedia Britannica, 2007, lema "Palestine: The Rise of Islam" dan "Palestine: Abbasid Rule."

Faisal M. Sakrie, *Melacak Yahudi Indonesia: Dari Maskapai Dagang VOC Sampai Jejak Fisik dan Pemikiran* (Yogyakarta: Bale Siasat, 2008).

Gregory Harms dan Todd M. Ferry, *The Palestine–Israel Conflict: A Basic Introduction. Second Ed.* (Ann Arbor: Pluto Press, 2008).

Hamid Mowlana, George Gerbner and Herbert I. Schiller, *Triumph of the File: The Media's War in the Persian Gulf — A Global Perspective* (Boulder: Westview Press, 1992).

Herry Nurdi, *Membongkat Rencana Israel Raya* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009).

Ibnu Burdah, *Konflik Timur Tengah: Aktor, Isu, dan Dimensi Konflik* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008).

Imam Marsudi, *Pandangan Partai-Partai Politik Indonesia Terhadap Prospek Formalisme Hubungan Dagang Indonesia-Israel,* tesis Studi Kajian Timur Tengah dan Islam, Pascasarjana Universitas Indonesia, 2005.

Ishak Rafick, *Catatan Hitam Lima Presiden Indonesia: Jalan Baru Membangun Indonesia* (Jakarta: Ufuk Press, 2007)

Jack C. Plano dan Roy Olton, *Kamus Hubungan Internasional* (Bandung: Abardin, 1999).

James L. Gelvin, *The Israel-Palestine Conflict: One Hundred Years of War* (Cambridge: Cambridge University Press, 2005).

James N. Rosenau, "Foreign Policy as Adaptive Behavior," *Comparative Politics* Vol. 2, April 1970.

Joan E. Spero, *The Politics of Internasional Economic Relations. Fourth edition* (New York: St. Martin's Press, 1990).

K.J. Holsti, *Politik Internasional: Kerangka Analisa* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1987).

Lukman Harun, "Partisipasi dan Solidaritas Rakyat Indonesia dalam Membantu Perjuangan Palestina: Pendekatan Sejarah," dalam Riza Sihbudi dan Achmad Hadi (eds.), *Palestina: Solidaritas Islam dan Tata Politik Dunia Baru* (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1992).

Lustick Ian, *For the Land and the Lord: Jewish Fundamentalism in Israel* (New York: Council on Foreign Relations Press, 1988).

Makarim Wibisono, *Tantangan Diplomasi Multilateral* (Jakarta:

LP3ES, 2006).
Martin Gilbert, *The Routledge Atlas of The Arab-Israeli Conflict 8th ed.* (London: Routledge, 2005).
Michael Leifer, *Politik Luar Negeri Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 1986).
Mohammad Hatta, *Mendayung Antara Dua Karang* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976).
___________, *Dasar Politik Luar Negeri Republik Indonesia* (Jakarta: Tintamas, 1953).
___________, "Indonesian Foreign Policy," *Foreign Affairs,* April 1953.
Muhsin Labib dan Irman Abdurrahman, *Gelegar Gaza* (Jakarta: Zahra, 2009).
Musthafa Abd. Rahman, *Dilema Israel: Antara Krisis Politik dan Perdamaian* (Jakarta: Penerbit Kompas, 2002).
Oded Yinon, "A Strategy for Israel in the Nineteen Eighties," *KIVUNIM: A Journal for Judaism and Zionism,* No. 14, musim dingin, 5742, Februari 1982.
Riza Sihbudi, "Perkembangan Timur Tengah dan Masalah Hubungan Indonesia-Israel," dalam Zainuddin Djafar, *Perkembangan Studi Hubungan Internasional dan Tantangan Masa Depan* (Jakarta: Dunia Pustaka, 1996)
Rizki Ridyasmara, *Fakta dan Data Yahudi di Indonesia Era Reformasi* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008).
Robert E. Harkavy dan Stephanie G. Neuman, *Warfare and the Third World* (London: Palgrave Macmillan, 2001).
Russell A. Stone dan Walter P. Zenner, *Critical Essays on Israeli Social Issues and Scholarship* (New York: SUNY Press, 1994).
Soedradjad Djiwandono, *Perdagangan dan Pembangunan : Tantangan, Peluang dan Kebijaksanaan Perdagangan Luar Negeri Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1992).
Soesiswo Soenarko, "Evaluasi Pelaksanaan Politik Luar Negeri Indonesia," dalam Zainuddin Djafar, *Perkembangan Studi Hubungan Internasional dan Tantangan Masa Depan* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1996)
Sukamdani S. Gitosardjono, *Dinamika Hubunan Indonesia – Tiongkok di Era Kebangkitan Asia* (Jakarta: Putra Perkasa Cahaya Bunda, 2006).
Terry Crowdy, *The Enemy Within: A History of Espionage* (Oxford:

Osprey Publishing, 2006).

Theodore A. Coulombis dan James H. Wolfe, *Pengantar Hubungan Internasional: Keadilan dan Power* (Bandung: Putra A. Bardin, 1999).

Theodor Herzl, *The Jewish State: An Attempt at a Modern Solution of the Jewish Question* (New York: American Zionist Emergency Council, 1946), hlm. 11.

V.W. Shaw, *A Survey of Palestine, Vol 1: Prepared in December 1945 and January 1946 for the Information of the Anglo-American Committee of Inquiry* (Washington, D.C.: The Institute for Palestine Studies, 1991 [cetak ulang]).

W. D. Coplin, *Pengantar Politik Internasional* (Bandung: Sinar Baru, 1992).

William C. Olson, David S. McLellan, dan Fred A. Sondermann (eds.), *The Theory and Practice of International Relations* (New Jersey: Prentice Hall, 1983).

Yanyan Mochamad Yani, "Politik Luar Negeri," makalah pada Ceramah Sistem Politik Luar Negeri bagi Perwira Siswa Sekolah Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (Sesko TNI AU) Angkatan ke-44 TP 2007, Bandung, 16 Mei 2007.

PERUNDANGAN, LAPORAN RESMI

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 26/MPP/Kep/II/2000 tertanggal 1 Februari 2000.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No.23/MPP/01/2001

UU No. 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

Asian Parliamentary Assembly (APA) 2009, "Bandung Declaration: On The Roles of Asian Parliaments in Strengthening Democracy towards Prosperity, Peace and Justice in Asia."

Carol Migdalovitz, *Israel: Background and Relations with the United States, Report to Congress,* Congressional Research Service, pemutakhiran terakhir 8 September 2008.

Catatan Resmi Sidang Umum PBB, Sesi ke-5, Supplemen No. 18, Document A/1367/Rev. 1, "General Progress Report and Supplementary Report of the United Nations Conciliation Commission for Palestine, Covering the Period from December

11, 1949 to October 23, 1950". The United Nations Conciliation Commission.

Departemen Luar Negeri Indonesia, *Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia,* Jakarta, Deplu, 8 Januari 2007.

MEDIA MASSA

Kompas, 25 Februari 1989.

Clyde Haberman, "After 4 Years, Intifada Still Smolders", *The New York Times,* 9 Desember 1991.

Sunday Times, 27 Juni 1993.

Jakarta Post, 28 Juni 1993.

"Gus Dur: Negara Kesatuan RI Tak Berdasar Agama," *Suara Pembaruan,* 7 November 1999.

Dewi Fortuna Anwar, "Hatta dan Politik Luar Negeri," *Kompas*, 9 Agustus 2002.

"Kalla: Kadin ke Israel, Pemerintah Tak Ikut Campur," *Republika,* 8 Juli 2006.

"Israeli jets pound Hamas", *The Sydney Morning Herald,* 29 Desember 2008.

Ahmad Munjin, "Pasar Ekspor Israel Tak Terpengaruh", inilah.com, 10 Januari 2009.

"Untung Rugi Hubungan Dagang Indonesia-Israel", harian ekonomi *Neraca,* 20 Januari 2010.

"IIPAC Launches Indonesia Business Lobby", *Jakarta Post,* 29 Januari 2010.

Kompas, Senin, 19 April 2010.

Jakarta Post, Minggu, 30 Mei 2010.

Kompas, Selasa, 1 Juni 2010.

Kompas, Kamis, 10 Juni 2010.

Insaf Albert Tarigan, "SBY: Politik Bebas Aktif Sudah Tak Layak," okezone.com, 16 Agustus 2010.

Jakarta Post, Rabu, 6 Oktober 2010.

"Akhirnya Dirut Telkomsel Akui Amdocs Milik Israel," muslimdaily.net, 30 Juni 2011.

SUMBER DARI INTERNET

Moenir Ari Soenanda, "Kepentingan Nasional Indonesia di Dunia

Internasional," Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika (P3K2 Aspasaf), diakses dari http://ditpolkom.bappenas.go.id/?page=news&id=31.

Setiawan Eko Nugroho, "Yahudi-Zionis-Israel?", http://www.mail-archive.com/itb@itb.ac.id/msg10036.html.

"Israel-Indonesia Relation", diakses dari www.israelasiacenter.org/page/ 4545735010.

"League of Nations: The Mandate for Palestine, July 24, 1922". Fordham University, Modern History Sourcebook, 24 Juli 1922. Diakses dari http://www.fordham.edu/halsall/mod/1922 mandate.html. 14 April 2011.

"The Population of Palestine Prior to 1948", MidEastWeb, diakses dari http://www.mideastweb. org/palpop.htm. 14 April 2011.

"Part 3: Partition, War and Independence". *The Mideast: A Century of Conflict,* National Public Radio, 2 Oktober 2002, diakses dari http://www.npr.org/ news/specials/mideast/ history/history3.html. 10 April 2011.

"Declaration of Principles on Interim Self-Government Arrangements", U.S. Department of State. 13 September 1993, diakses dari http://www.state.gov/ p/nea/rls/22602.htm.

"The Electoral System in Israel." Diakses dari http://www.knesset.gov.il /description/eng/eng_mimshal_beh.htm, 15 April 2011.

"Economy Rankings — Middle East & North Africa". The World Bank Group. Diakses dari http://www.doingbusiness.org/economyrankings/ default.aspx?regionid=4. 15 April 2011.

"Global Competitiveness Report 2006-2007". World Economic Forum. 14 Februari 2007. Diakses dari http://www.weforum.org/en/initiatives/gcp/Global%20Competitiveness%20 Report/index.htm.

"Total GDP 2009" The World Bank. Diakses dari http://siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/Resources/GDP.pdf, Juni 2011.

"Israel's Diplomatic Missions Abroad: Status of Relations". Israel Ministry of Foreign Affairs. 12 Juli 2006, diakses dari http://www.mfa.gov.il/MFA/About%20the%20Ministry/Diplomatic%20missions/Israel-s%20Diplomatic%20Missions %20Abroad. 14 April 2011.

"Israel: Background and Relations with the United States Updated".

Defense Technical Information Center, diakses dari http://www.dtic.mil/cgi-bin/ GetTRDoc?AD=ADA470003 &Location =U2&doc=GetTRDoc.pdf. 15 April 2011.

"Germany and Israel". Background Papers, Kedutaan Besar Jerman di AS, Washington, D.C, diakses dari http://www.germany.info/relaunch/info/archives/background/israel.html. 14 April 2011.

WAWANCARA

Wawancara dengan Emanuel Shahaf pada Minggu, 12 Desember 2010.

Wawancara dengan Raden Sulistya Widayanta, Kepala Subdirektorat Fasilitasi dan Aturan Perdagangan Direktorat Kerjasama Multilateral, pada 20 Desember 2010.

Wawanacara dengan Nanda Avalis, Kepala Seksi Lebanon dan Palestina Direktorat Timur Tengah Kementerian Luar Negeri, pada Kamis, 23 Desember 2010.

LAMPIRAN 1

PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 102/SK/VIII/1967 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN KEBIJAKSANAAN DALAM BIDANG EKSPOR DAN PEMASARAN BARANG-BARANG/HASIL-HASIL BUMI INDONESIA
(Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI. No. 26/MPP/Kep/II/2000 tanggal 1 Februari 2000)

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menghadapi era perdagangan bebas dan meningkatkan posisi Indonesia di pasar internasional, dipandang perlu mencabut Keputusan Menteri Perdagangan No.102/SK/VIII/1967;
b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Mengingat :

1. Keputusan Presiden RI No. 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
2. Keputusan Presiden RI No. 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
3. Keputusan Presiden RI No. 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden RI No. 115 Tahun 1999;
4. Keputusan Presiden RI No. 355/M Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabinet Tahun 1999-2004;
5. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.405/MPP/Kep/9/1999;
6. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 444/MPP/Kep/11/1998 jo No.24/MPP/Kep/1/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dep. Perindustrian dan Perdagangan;
7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 558/MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 146/MPP/Kep/4/1999;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA :

Mencabut Keputusan Menteri Perdagangan No.102/SK/VIII/67 tentang Ketentuan Kebijaksanaan Dalam Bidang Ekspor Dan Pemasaran Barang-barang/Hasil-hasil Bumi Indonesia.

K E D U A :

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Februari 2000
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI
ttd.
M.JUSUF KALLA

LAMPIRAN 2

Keputusan Menteri Nomor: 23/MPP/01/2001

Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

Nomor: 23/MPP/01/2001 **Jakarta, 10 Januari 2001**

Perihal: Surat Keterangan

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 26/MPP/II/2000 tanggal 1 Februari 2000 tentang Pencabutan Surat Keputusan Menteri Perdagangan No. 102/SK/VIII/1967 tentang Pelaksanaan Peraturan-Peraturan dibidang Kebijakan Ekspor dan Pemasaran Barang-Barang Produksi Indonesia, perlu disampaikan bahwa saat ini tidak ada lagi hambatan atau larangan secara hukum untuk perusahaan Indonesia melakukan dagang dengan perusahaan Israel dan sebaliknya.

LAMPIRAN 3

Wawancara tertulis dengan Emanuel Shahaf
CEO Technology Asia Consulting dan
Ketua Kamar Dagang Israel-Indonesia
12 dan 13 Desember 2010

Was there any trading between two countries before 2001? It would better if you can explain the trading of two countries in Soekarno era, Soeharto era, and post reform era (1998-now).

I have never seen evidence of any trading before the Soeharto era but I am sure that there was. For the simple reason that it is possible and that it can be done and could be done through third parties (as long as direct trade was illegal). But, as I said, I did not see any evidence. If there was trade, I am sure it was small and of no consequence economically for either country. Things started to develop seriously in the Soeharto era and the original relations of substance were most likely military ones. Indonesia, on the background of the invasion of Timor Timor, was in dire need of military equipment and Israel, with US agreement, suplied A4 Skyhawk aircrafts and helicopters from Israel Air Force stock. In addition, Israeli companies upgraded Indonesian army equipment that came from the Soviet Union. During that time (1980s-1990s) a commercial relationship started to develop. The centerpiece of this relationship was coal, which, until 2008 was the single biggest item on the export list which reached almost US$200 M (out of US$800 M total) in 2008. During the Soeharto era there were also some exports

(from Israel to Indonesia) including know-how and technology for dairy farming (Tapos).

Incidentally, coal exports to Israel almost totally stopped after 2008 not for political reasons (apparently the Israel Electric Company, the only customer, found better/cheaper sources for its coal).

Except coal, what other items or commodities from Indonesia which is still needed by Israel?

There are no commodities or products which Israel "needs" from Indonesia. Israel can get all its requirements from other sources. There may be products which are interesting because the prices are low in Indonesia, possibly some chemicals, come textiles, wood products. I don't think there is anything in Indonesia that we can't get from somewhere else. So as a market for Indonesia, Israel is not really exciting. What is interesting for Indonesia is that Israel is a hub — for example I am getting a lot of requirements for Indonesian coal, for other European or Asian countries. Israelis are very cosmopolitan and they are well connected and these connections can be useful for the Indonesian economy. And, off course, Indonesia is a very exciting market for Israeli companies in many areas.

So for Israel, which is more important, political relationship or economic relationship with Indonesia?

Both things are important for Israel but the political relationship is dependent on the developments in the Israel-Palestinian relationship since Indonesia refuses to consider diplomatic relations with Israel until there is peace agreement in the Middle-East. Actually, Indonesia in this respect is far more extreme than Arab countries (Jordan, Egypt and others) who do have diplomatic relations with Israel.

The political relationship with Indonesia is important

since Israel needs to develop relations with the Muslim world and especially, moderate Muslim countries. In that way, its population can learn that Muslims are not all radicals or as extreme as some of our neighbors (Hizbollah, Hamas). Unfortunately, Israel does almost nothing do work on the relationship. I am not sure that Indonesia is interested, anyway since anything which has to do with Israel is a hot potato in Indonesia since politicians are afraid to be associated with it because of the FPI or PKS or MUI, you name it — I miss Gus Dur, he wasn't afraid of anything.

The economic relationship is important since Indonesia is a huge potential market mainly for Israeli technologies and know-how. There is a good match between the two economies — we have know-how, technologies and entrepeneurship and you have resources and a huge requirement for infrastructure development in almost anything we are good at (agriculture, medicine, IT/Telecom).

Why Israel and Indonesia running economic relationship, especially trading (export-import), without diplomatic relationship?

It's not that there is an alternative — Indonesia is not, at this time, willing (for internal political reasons) to consider diplomatic relations with Israel. Since diplomatic relations are not a prerequisite for economic relations, the economic relations, driven by business interests develop anyway. Not as fast, and with many difficulties but no government has yet been able to prevent businessmen from finding a way to make business. Israel would open an embassy in Indonesia tomorrow, if Indonesia was willing to. By the way, there is a "middle way" –the Taiwan Solution—a Trade Mission in both countries, without diplomatic recognition, just like Taiwan has in Indonesia. This could work if Indonesia was willing to—maybe

some day when the political climate improves.

Why Indonesia should gain economic relationship with Israel? Is there any comparative superiority between Israel and other Middle East nations?
To make a long story short, Israel is extremely innovative, we take the initiative and we are technology leaders in many things Indonesia needs. This is one item which will definitely surprise you: 75% of the intellectual property of Intel ("Intel Inside") is from Israel. Microsoft's numbers are not much smaller. We are a technology powerhouse. To make it short, there are no other countries in the Middle East which come close to Israel's overall economic performance.

Can you please explain in more details? Does it means Indonesia import such commodity (Intel Inside) from Israel?
Many of the products sold in Indonesia –especially if they are high-tech products—contain either products made in Israel or designed in Israel, regardless of where you buy them. For example, every single chip designed by Intel since 1972 was designed at Intel's design center in Israel. Some of the chips are also produced at Intel's factory in Israel (I think there are only 2 or 3 Intel factories in the world which produce chips) so any laptop or desktop with "Intel Inside" is most likely to have an Israeli made chip inside. Today, with all the sophisticated products in the high-tech market, it's impossible to buy a product which is all made in one country. Any hi-tech product has components from several countries, one of them, more often than not, is Israel.

Are there any consequences for the actors of two countries with such trading system?
Yes, there are penalties for both sides: trade is much more diffi-

cult and expensive under the present system. The big loser is Indonesia (because it has the need for Israeli technologies and know-how). Israel suffers because it's difficult to get access to Indonesia but Israel has alternatives. Indonesia loses even more since Israeli investors are usually the most daring investors who are the first in any difficult environment. The lack of diplomatic relations and legal certainty/protection makes it almost impossible (much too dangerous) for an Israeli to invest in Indonesia. So Indonesia loses twice: investment and important know-how and technologies.

How do they (actors) running the trade?
They do business usually through third countries (Singapore, US, Europe). In some instances, Israeli companies have subsidiaries in other countries so even if the equipment comes from Israel the accompanying documents are from somewhere else. The end user always knows where it is from but he just wants to protect himself and say: This is from the US, Singapore or Europe.

Who are they (actors)? Personal or company? State or non-state actors?
Almost without exception, private businessmen. In the coal-trade, the buyer may have been a government owned company but even that may have been a deal through private businessmen. Some of the arms-deals in the 1980s (Soeharto) may have been G2G (government to government) but I am not sure. Today there are no G2G deals which is a pity because if the Indonesian government would want to buy, let's say armaments from Israel, G2G would be the cheapest.

In what year Israel-Indonesia Chamber of Commerce was established? And where is the office?

It was established in the summer of 2009 in Tel-Aviv. It operates out of the offices of the Israel-Asia Chamber of Commerce in Industry House, No. 29 Hamered Street, Tel-Aviv 68125, Israel.

How about Indonesia-Israel Chamber of Commerce?
Until now, no such thing. Nobody has enough guts to start one on your side. For the time being. Even I was asked not to make use of the name Israel-Indonesian Chamber of Commerce in Indonesia. I was asked to use Israel-Asia Chamber of Commerce. That's life. When radicals are vocal and scare everybody and moderates don't do anything about it.

So how do the Israel-Indonesia Chamber of Commerce could be operated well without a corresponding office in Indonesia? What is the framework of operation?
Basically we are an office which "collects" expressions of interest of Israeli companies (that's why it's important we have an office in Israel) and helps them find partners or customers in Indonesia. How do we do that? Through people and companies in Indonesia who we know and who know us. Example: An Israeli company turns to me to buy coal in Indonesia for a customer in China. I have a contact in Indonesia and write to him and this is the way the deal develops. Or, an Israeli company wants to sell a certain product in Indonesia – they turn to me and ask me to find them a partner who can help them to sell in Indonesia. I write to my contacts and whoever is willing or interested to pick up on it takes the job. We don't really need an office in Indonesia. We are the Israel-Indonesia Chamber of Commerce. If there was an Indonesia-Israel Chamber of Commerce, they would need an office in Indonesia to be able to help Indonesian companies to find customers in Israel. We would, off course, be more than willing to help any Indonesian

company here as well. Today, with e-mail as developed as it is, it's really not necessary to have an office. But from time to time there are mutual visits.

Indeks